PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *RETURN ON ASSETS* (ROA), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) TERHADAP BESARAN PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

SKRIPSI

Oleh :

VIVIN RIZKI RACHMAWATI

NIM : G94216206

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Vivin Rizki Rachmawati

NIM : G94216206

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2019.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Vivin Rizki Rachmawati

NIM. G94216206

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Vivin Rizki Rachmawati NIM. G94216206 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 1 Juli 2020

Pembimbing,

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI.

NIP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vivin Rizki Rachmawati NIM. G94216206 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 8 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI.	**Dr. Hj. Fatmah, S.T. MM**
NIP. 201603311	NIP. 197507032007012020
Penguji III	Penguji IV
Imam Buchori, SE., M.Si.	**M. Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI**
NIP. 196809262000031001	NIP. 199103162019031013

Surabaya, 8 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	**Vivin Rizki Rachmawati**
NIM	:	**G94216206**
Fakultas/Jurusan	:	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah**
E-mail address	:	**vivinrizki09@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

Vivin Rizki Rachmawati

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2019"** ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara DPK, ROA, NPF, FDR, dan GWM terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berjenis penelitian asosiatif untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk data-data triwulan dari laporan statistis perbankan syariah periode 2010 sampai 2019.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan, ROA berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan NPF dan GWM tidak berpengaruh terhadap besaran Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah diharapkan untuk membuat inovasi produk simpanan dana murah (tabungan dan giro) untuk meminimalisir terjadinya pengalihan dana karena inflasi. Dalam peningkatan DPK, perbankan syariah diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja manajemen dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan Aset dalam bentuk pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan pendukung perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Dalam penyaluran pembiayaan, perbankan syariah diharapkan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan dengan tetap memperhatikan faktor yang memengaruhinya dan terus meningatkan kinerja manajemen pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah dengan cara lebih teliti dalam melakukan seleksi calon debitur, mengontrol usaha debitur, dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR GRAFIK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Kegunaan Hasil Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Landasan Teori 16

1. Perbankan Syariah 16

2. Pembiayaan 23

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiyaan 42
5. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan 46
6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan 50
7. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Pembiayaan 52
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 58
C. Kerangka Konseptual 61
D. Hipotesis 62
BAB III METODE PENELITIAN 64
A. Jenis Penelitian 64
B. Waktu dan Tempat Penelitian 64
C. Populasi dan Sampel Penelitian 65
D. Variabel Penelitian 68
E. Definisi Operasional 69
F. Data dan Sumber Data 72
G. Teknik Pengumpulan Data 72
H. Teknik Analisis Data 73
BAB IV HASIL PENELITIAN 81
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 81
1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia 81
2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) 111
4. Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) 116
5. Perkembangan *Return On Assets* (ROA) 122
6. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) 124
7. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 126
8. Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM) 128
B. Analisis Data 138
1. Uji Asumsi Klasik 139
2. Uji Asumsi Klasik *First Difference* 144
3. Analisis Regresi Linier Berganda 147
4. Uji Hipotesis 150
a. Uji Koefisien Determinasi 150
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 150
c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 152
BAB V PEMBAHASAN 156
A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia 156
B. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia 166
C. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia 173

E. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia 177

BAB VI PENUTUP 180

A. Kesimpulan 180

B. Saran 182

DAFTAR PUSTAKA 186

LAMPIRAN 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Perkembangan Jumlah Bank Syariah 2010-2019 2

2.1 Perbedaan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* 39

2.2 Penelitian Terdahulu 59

3.1 Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014-2019 66

3.2 Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2014-2019 67

3.3 Ketentuan Pengujian *Durbin-Watson* 76

4.1 Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2010-2019 91

4.2 Perkembangan DPK BUS dan UUS Tahun 2010-2019 112

4.3 Perkembangan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019 117

4.4 Perubahan Ketentuan GWM Perbankan Nasional 2010-2019 130

4.5 Perubahan Ketentuan GWM Perbankan Syariah 134

4.6 Perkembangan GWM BUS dan UUS Tahun 2010-2019 137

4.7 Hasil Uji Normalitas 139

4.8 Hasil Uji Multikolinieritas 140

4.9 Hasil Uji Autokorelasi 142

4.10 Hasil Uji Normalitas *First Difference* 144

4.11 Hasil Uji Multikolinieritas *First Difference* 145

4.12 Hasil Uji Autokorelasi *First Difference* 146

4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 147

4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi 150

4.15 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.16 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Fungsi Utama Bank Syariah 17

2.2 Jenis-Jenis Bank Syariah 20

2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan 28

2.4 Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan 42

2.5 Kerangka Konseptual 61

4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 143

4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas *First Difference* 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

1.1 Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah 2010-2019 4

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2010-2019 6

4.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2010-2019 111

4.2 Penempatan Dana BUS dan UUS dalam Bentuk Pembiayaan 117

4.3 Perkembangan ROA BUS dan UUS Tahun 2010-2019 122

4.4 Perkembangan NPF BUS dan UUS Tahun 2010-2019 124

4.5 Perkembangan FDR BUS dan UUS Tahun 2010-2019 126

5.1 Perkembangan DPK dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019 157

5.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS Tahun 2010-2019 159

5.3 Perkembangan ROA dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019 167

5.4 Perkembangan NPF dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019 171

5.5 Perkembangan DPK, PYD, dan FDR BUS dan UUS Tahun 2010-2019 175

5.6 Perkembangan GWM dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi sebesar 232,5 juta jiwa.[1] Dengan besarnya jumlah penduduk Muslim tersebut, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Selain masyarakat Muslim yang membutuhkan dan mendukung diterapkannya syariat Islam dalam sistem perbankan, masyarakat Non-Muslim juga menjadi sasaran pasar perbankan syariah. Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan yang disalurkan kepada sektor rill dan sektor non-rill. Pembiayaan merupakan solusi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan konsumsi, investasi, modal kerja, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pembiayaan yang disalurkan khususnya kepada sektor rill berperan untuk meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas sekor rill yang meningkat akan meningkatkan iklim dunia usaha dan investasi, selanjutnya akan meningkatkan pendapatan nasional.

[1] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berperan terhadap pembangunan ekonomi nasional, pembiayaan juga merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Dengan memberikan pembiayaan, bank syariah akan mendapatkan *return* atau pendapatan atas dana yang disalurkan tergantung dari prinsip pembiayaan yang digunakan. Dalam prinsip jual beli, pendapatan yang diperoleh bank syariah berupa margin keuntungan yang merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Dalam prinsip kerja sama usaha, pendapatan yang diperoleh bank berupa bagi hasil. Apabila dalam usahanya nasabah mendapat keuntungan yang besar, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Sebaliknya, apabila nasabah mendapatkan keuntungan yang kecil, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang kecil. Sedangkan dalam prinsip sewa menyewa, pendapatan yang diperoleh bank berupa pendapatan sewa.

Berikut merupakan perkembangan perbankan syariah yang ditinjau dari jumlah bank syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Bank Syariah 2010-2019[2]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah BUS	11	11	11	11	12	12	13	13	14	14
Jumlah UUS	23	24	24	23	22	22	21	21	20	20

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2010, jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 11 BUS dan 23 UUS. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah BUS tetap sebanyak 11 BUS, sedangkan jumlah UUS mengalami peningkatan menjadi 24 UUS. Pada tahun 2013, jumlah BUS tetap, sedangkan jumlah UUS mengalami penurunan menjadi 23 UUS dikarenakan tutupnya HSBC Syariah. Dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019, setiap 2 (dua) tahun jumlah BUS selalu mengalami peningkatan, sedangkan jumlah UUS selalu mengalami penurunan. Tercatat bahwa pada tahun 2014, jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 12 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 22 UUS. Selanjutnya, pada tahun 2016 jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 13 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 21 UUS. Terjadi kembali pada tahun 2018, dimana jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 14 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 20 UUS. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan jumlah BUS dan penurunan jumlah UUS tersebut adalah dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mentransformasikan UUS menjadi BUS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS)".

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah memiliki fungsi pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus* unit) yang biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit* unit) dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip jual beli, kerja sama, dan sewa menyewa. Berdasarkan fungsi pokok perbankan syariah tersebut, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) menjadi indikator utama perkembangan perbankan syariah, disamping jumlah Aset yang dimiliki. Berikut merupakan indikator utama perkembangan perbankan syariah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

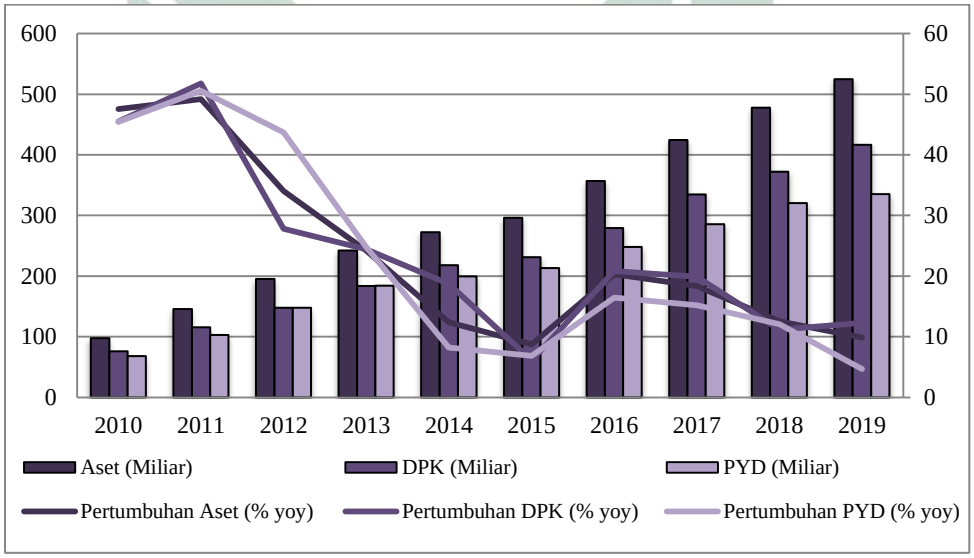

Grafik 1.1

Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah 2010-2019[3]

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Grafik 1.1 tersebut diketahui bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikator utama perkembangan perbankan syariah yang meliputi nilai Aset, jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) secara nominal selalu mengalami peningkatan. Namun, apabila dilihat dari persentase pertumbuhannya, indikator utama perkembangan perbankan syariah tersebut mengalami fluktuasi. Dari tahun 2012 sampai dengan 2015, pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan yang drastis dari tahun sebelumnya, dimana perbankan syariah hanya mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 12,41%, 18,71%, dan 8,24%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan, namun mulai dari tahun 2017 perbankan syariah kembali mengalami penurunan pertumbuhan.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,89% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp. 524,56 triliun. Jumlah Aset tersebut dikontribusikan oleh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sisi pasiva dan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dari sisi aktiva. Pada akhir tahun 2019, perbankan syariah mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,30% (yoy) menjadi Rp. 416,56 triliun yang dihimpun dari 32,18 juta rekening nasabah dengan 3 jenis instrumen penghimpunan dana yaitu 54,16% dalam bentuk deposito, 31,99% dalam bentuk tabungan, dan 13,84% dalam bentuk giro. Sedangkan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh sebesar 4,68% (yoy) dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp. 335,18 triliun yang disalurkan pada 5,80 juta rekening nasabah pembiayaan dengan 3 jenis penggunaan yaitu 44,37% untuk konsumsi, 31,13% untuk modal kerja, serta 24,48% untuk investasi.

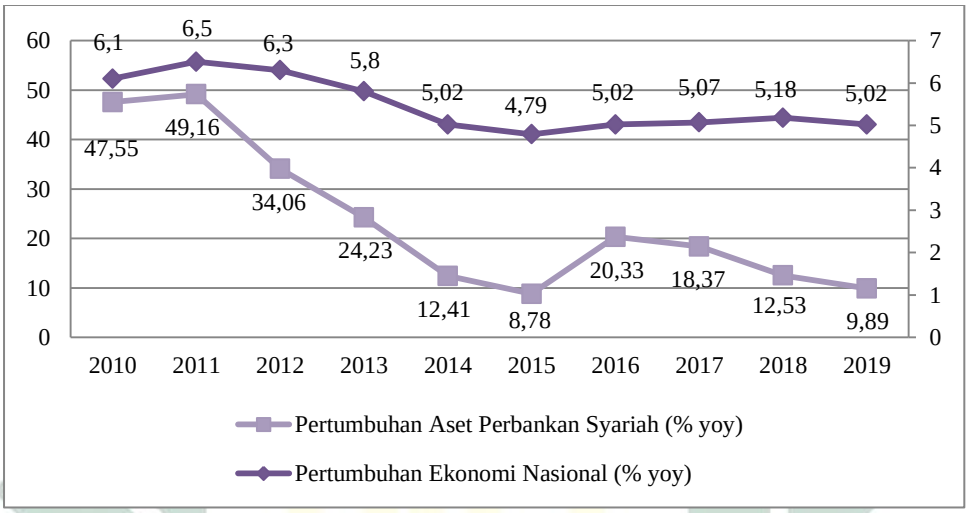

Grafik 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2010-2019

Berdasarkan Grafik 1.2 tersebut diketahui bahwa pada periode yang sama, salah satu hal yang memengaruhi fluktuasi pertumbuhan perbankan syariah adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki karakteristik *real sector driven*, sehingga peningkatan dan penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pasar keuangan global dan terganggunya stabilitas perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak krisis ekonomi global mulai dirasakan oleh Indonesia pada triwulan IV tahun 2008 sehingga Indonesia mencatatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,4% (yoy) di triwulan III menjadi sebesar 6,1% (yoy) di akhir tahun 2008. Pada awal tahun 2009, terjadi ketidakpastian terkait seberapa dalam kontraksi global dan seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, sehingga berdampak pada tingginya risiko di sektor keuangan dan kegiatan ekonomi di sektor rill domestik. Tantangan yang terjadi sepanjang tahun 2009 mampu dilewati oleh Indonesia dimana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5% (yoy).

Dampak krisis ekonomi global masih dirasakan oleh Indonesia hingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren menurun dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kondisi tersebut terjadi karena selama proses perbaikan kondisi ekonomi, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang menjadi penghambat proses perbaikan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang disebabkan karena adanya stimulus fiskal yang cukup besar yang didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia sehingga mendukung permintaan domestik tetap tinggi, khususnya melalui konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan namun pertumbuhan perbankan syariah menurun yang disebabkan oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan dengan baik karena belum berakhirnya proses konsolidasi internal perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi nasional menurun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang terjadi karena adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok di sepanjang tahun 2019 sehingga volume perdagangan global, produksi manufaktur, dan investasi yang mengalami penurunan.

Selain dipengaruhi oleh kinerja sektor rill, pertumbuhan perbankan syariah khususnya Aset perbankan syariah yang tinggi disebabkan karena perbankan syariah telah memelihara kesehatannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan mengenai kesehatan bank terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi "Bank wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian" dan Ayat 3 yang berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank". Semakin sehat perbankan syariah, berarti semakin baik perbankan syariah dalam operasionalnya, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, mulai dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana, khususnya melalui pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan (debitur) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor internal bank adalah kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sehingga, semakin besar jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Qolbi (2013), Hasi (2014), Adzimatinur (2014), Nurrochman (2016), Umiyati (2016), Pujiana (2017), dan Bakti (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Faktor internal lainnya yang memengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengelola aset secara optimal khususnya dalam bentuk penyaluran pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qolbi (2013), Nurrochman (2016), Pujiana (2017), dan Bakti (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasi (2014), Adzimatinur (2014), dan Umiyati (2016) mendapatkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestasi (2012) mendapatkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Nilai NPF akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah. Saat terjadi pembiayan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi NPF menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Lestari (2012), Nurrochman (2016), dan Pujiana (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adzimatinur (2014) dan Bakti (2017) mendapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2016) mendapatkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga berpengaruh terhadap besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank. FDR adalah rasio keuangan yang mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank, didapatkan dengan membandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga, sehingga dapat diduga bahwa FDR akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai FDR maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Lestari (2012), Hasi (2014), Adzimatinur (2014), Nurrochman (2016), dan Umiyati (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Selain faktor-faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang diduga dapat memengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Faktor tersebut yaitu kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan moneter dalam rangka mengontrol dan mengawasi sektor perbankan agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu yang akan berdampak pada kepercayaan nasabah. Perubahan jumlah GWM yang diwajibkan kepada bank akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh Bank. Semakin tinggi jumlah GWM yang dikenakan kepada bank, akan menyebabkan semakin sedikit jumlah dana yang dipegang oleh bank, sehingga semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Peningkatan GWM telah menyebabkan terjadi peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap kondisi bank sehingga pada jangka panjang juga akan terjadi peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah atau besaran pembiayaan perbankan syariah serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali serta melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah atau besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Faktor-faktor internal perbankan syariah yang akan diteliti yaitu berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menambahkan faktor eksternal perbankan syariah berupa kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2019 sehingga terdapat perbedaan kondisi yang terjadi pada periode penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan triwulan perbankan syariah yang didapatkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2010 sampai dengan 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat dalam 2 (dua) aspek berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada mengenai pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal perbankan syariah khususnya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran atau jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada penulis sehingga dapat menambah ilmu yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan, khususnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi besaran atau jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

c. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konribusi bagi pengambil kebijakan di perusahaan dalam hal ini perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1] Sedangkan pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[2]

Bank disebut dengan *Financial Depository Institution* dikarenakan bank berperan dalam 2 (dua) sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Selain itu, bank juga disebut dengan lembaga intermediasi (*Financial Intermediary*) dikarenakan bank mempunyai 2 (dua) fungsi pokok, yaitu

[1] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.
[2] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Fungsi Perbankan Syariah

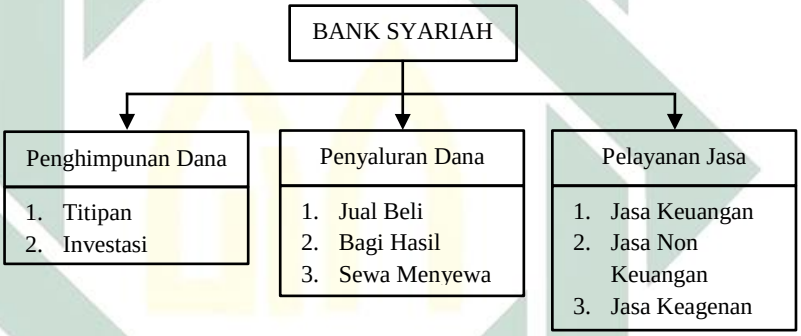

Gambar 2.1

Fungsi Utama Bank Syariah

Perbankan syariah memiliki 3 (tiga) fungsi utama, antara lain:

1) Penghimpunan Dana

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang dilakukan dengan 2 (dua) bentuk penghimpunan, yaitu:

a) Bentuk titipan dengan akad *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara nasabah dan bank syariah, dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah dan bank syariah menerima titipan untuk dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan titipan tersebut dalam transaksi yang diperbolehkan syariat Islam.

b) Bentuk investasi dengan akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank syariah (*mudharib*), dimana nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah dan bank syariah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan syariat Islam.

2) Penyaluran Dana

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) yang dilakukan dengan beberapa bentuk penyaluran, antara lain:

a) Bentuk bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

b) Bentuk sewa-menyewa dengan akad *Ijarah* dan sewa-beli dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

c) Bentuk jual beli dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*.

3) Pelayanan Jasa

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah memberikan pelayanan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa yang diberikan bank syariah terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pelayanan jasa keuangan

Bank syariah dalam menyediakan pelayanan jasa keuangan biasanya dilakukan menggunakan beberapa prinsip, yaitu *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lainnya.

b) Pelayanan jasa non-keuangan

Bank syariah dalam menyediakan pelayanan jasa non-keuangan biasanya dilakukan menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dalam bentuk *save deposit box. Save Deposit Box* (SDB) adalah jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan *box* atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah.[3] Keuntungan dari adanya jasa *Save Deposit Box* (SDB) bagi nasabah yaitu dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting, surat berharga, perhiasan, dan lainnya dengan aman. Sedangkan keuntungan bagi bank yaitu bank akan mendapatkan *fee* tergantung besar kecilnya ukuran *box* yang didapatkan dari nasabah setiap tahunnya.

[3] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pelayanan jasa keagenan

Bank syariah dalam menyediakan pelayanan jasa keagenan biasanya dilakukan menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah.*[4]

c. Jenis-Jenis Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan atau perbankan lainnya. Namun, transaksi yang ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Terdapat suatu bank yang menawarkan semua produk perbankan dan terdapat pula sebagian bank yang hanya menawarkan produk tertentu.

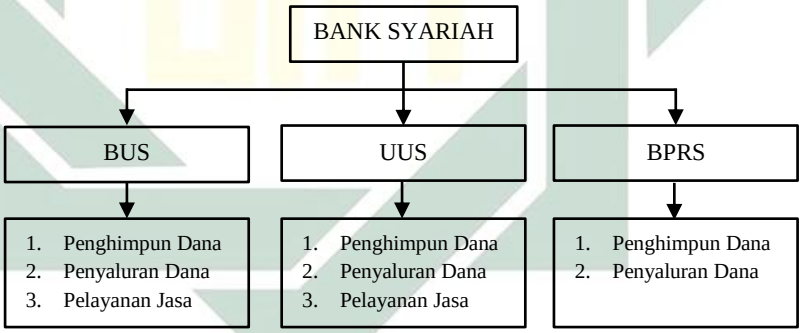

Gambar 2.2

Jenis-Jenis Bank Syariah

[4] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan 3 jenis bank syariah yang ditinjau dari segi fungsinya, antara lain:

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah badan usaha yang berdiri sendiri yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga), penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan jasa, dimana aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) disebut dengan *full branch* karena bank tersebut berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya sehingga bukan merupakan bagian atau di bawah koordinasi bank konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) dapat dimiliki oleh bank konvensional dengan catatan aktivitas dan pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit usaha di bawah pengelolaan atau bagian dari bank konvensional yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga), penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan jasa, dimana aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.[5]

Unit Usaha Syariah (UUS) tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari induknya yaitu bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun, transaksi UUS tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. UUS memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.[6]

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa memberikan pelayanan jasa.

[5] Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.
[6] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[7] Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[8]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

[7] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 73.
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Teknik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna dana, bahwa nasabah wajib untuk mengembalikan dana yang telah diterima ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil sebagai balas jasa kepada bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan.

Prinsip syariah sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), penyertaan modal (*Musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), sewa murni (*Ijarah*), sewa dengan pemindahan kepemilikan (*Ijarah wa iqtina*).[9]

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan tujuan pembiayaan secara mikro.

[9] Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pembiayaan secara makro, antara lain:[10]

1) Peningkatan ekonomi masyarakat, karena dengan adanya pembiayaan maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan selanjutnya akan meningkatkan taraf ekonominya.
2) Peningkatan usaha, karena dengan adanya pembiayaan maka masyarakat akan mendapatkan dana tambahan sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.
3) Peningkatan produktivitas, karena dengan adanya pembiayaan maka masyarakat dapat meningkatkan daya produksi usahanya.
4) Membuka lapangan kerja baru, karena dengan adanya pembiayaan maka memungkinkan dibukanya sektor-sektor usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja baru pula.
5) Terjadi distribusi pendapatan, karena dengan adanya pembiayaan maka masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja sehingga memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro, antara lain diberikan dalam rangka untuk:[11]

1) Mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dikerjakan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba yang maksimal.

[10] Rivai Veithzal dan Srviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681.
[11] Ibid., 682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meminimalkan risiko, artinya setiap usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus dapat meminimalkan risiko yang timbul.

3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangan dengan melakukan perpaduan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya pembiayaan dapat menjadi jembatan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit*).

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan, antara lain:[12]

1) Pembiayaan berfungsi sebagai peningkat daya guna (*utility*) dari uang atau modal, karena setiap uang atau dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, uang tersebut dalam persentase tertentu akan ditingkatkan kegunaannya untuk memperluas usahanya.

2) Pembiayaan berfungsi sebagai peningkat daya guna (*utility*) dari barang, karena pembiayaan yang disalurkan kepada produsen akan ditingkatkan daya gunanya dengan cara mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 304-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan berfungsi sebagai peningkat peredaran dan lalu lintas uang, apabila pembiayaan disalurkan melalui rekening koran. Pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan sebagainya.

4) Pembiayaan berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, karena pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan meningkatkan usaha tersebut, maka keuntungan yang didapatkan akan meningkat sehingga pendapatan nasional juga mengalami peningkatan.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[13] Pada pembiyaan konsumtif, fokus analisis dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji.[14]

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*..., 37.
[14] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam artian luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.[15] Pada pembiyaan produktif, fokus analisis diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.[16]

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan prinsip yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

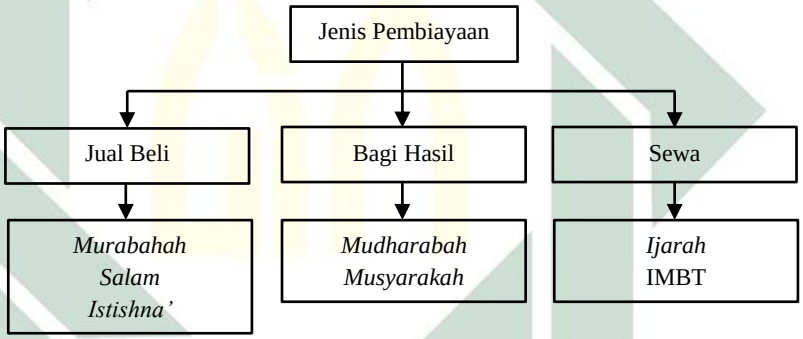

Gambar 2.3

Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah prinsip yang dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori...*, 37.
[16] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan.[17] Prinsip jual beli terdapat dalam produk perbankan syariah, antara lain:

a) Jual beli dengan akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.[18] Dengan kata lain, *murabahah* adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli atas suatu barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga dan mensyaratkan sejumlah keuntungan yang diharapkan kepada pihak pembeli.

b) Jual beli dengan akad *Salam*

Salam adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli atas suatu barang berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka pada saat akad, sedangkan pengiriman barang dilakukan di akhir kontrak.

c) Jual beli dengan akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli atas suatu barang berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu dengan harga jual dan cara pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran atas

[17] Muhammad, *Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), 18.
[18] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dengan akad *istishna'* dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran, ataupun di akhir pada saat barang pesanan diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli.

2) Prinsip Bagi Hasil

Dalam perbankan, terdapat dua jenis bagi hasil yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Nisbah adalah presentase bagi hasil yang dapat disepakati dengan nasabah yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil terdapat dalam produk perbankan syariah, antara lain:

a) Bagi hasil dengan akad *Mudharabah*

Mudaharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[19]

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori...*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bagi hasil dengan akad *Musyarakah*

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[20]

3) Prinsip Sewa

a) Sewa menyewa dengan akad *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan, sedangkan biaya pemeliharaan aset atau objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

b) Sewa beli dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik atau *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa

[20] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pihak yang menyewakan dapat menghibahkan objek sewa kepada penyewa.

e. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah untuk mencegah kemungkinan terjadinya gagal bayar (*default*) oleh nasabah. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dikenal dengan prinip 5C sebagai berikut.

1) *Character*

Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter, watak, atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai keinginan atau komitmen untuk memenuhi kewajiban membayar kembali (*willingness to repay*) pembiayaan yang telah diterima hingga lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk mengetahui *character* calon nasabah pembiayaan, antara lain:

a) BI *checking*, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah di Bank Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah apabila telah menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari pihak lain, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

2) *Capacity*

Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali (*willingness to repay*) pembiayaan yang telah diterima hingga lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk mengetahui *capacity* calon nasabah pembiayaan, antara lain:

a) Melihat laporan keuangan, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah melalui laporan keuangan dengan melihat laporan arus kas sehingga dapat diketahui sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana oleh nasabah.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah melalui slip gaji dan rekening tabungannya sehingga dapat diketahui sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah.

3) *Capital*

Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keseriusan dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali (*willingness to repay*) pembiayaan yang telah diterima hingga lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk mengetahui *capital* calon nasabah pembiayaan, antara lain:

a) Melihat laporan keuangan, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah berupa perusahaan melalui laporan keuangan dengan melihat tingkat *debt to equity ratio* atau jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar, maka perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai risiko.

b) Uang muka, yaitu melakukan analisis terhadap calon nasabah berupa perorangan dan dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang jelas dengan melihat jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka yang dimiliki, maka kemungkinan pembayaran akan lancar.

4) *Collateral*

Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap agunan yang diberikan oleh calon nasabah dengan tujuan apabila calon nasabah tidak dapat melakukan pembayaran kembali (*willingness to repay*) pembiayaan yang telah diterima, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan tersebut sehingga hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of Economy*

Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap kondisi perekonomian yang berkaitan dengan sektor usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa mendatang.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk lainnya.[21] Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha.[22]

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan mencerminkan keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasionalnya dengan sumber dana ini. Pencarian dana pihak ketiga relatif paling mudah dibandingan sumber dana bank lainnya, yaitu sumber dana pertama berupa modal sendiri dan sumber dana kedua berupa pinjaman dari Bank Indonesia dan bank lain.

Dana pihak ketiga juga banyak tersedia di masyarakat. Peningkatan dana pihak ketiga disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah meningkat, maka bank syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara lebih optimal dalam hal penyaluran dana atau pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana.

---

[21] Veithzal Rivai et al., *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 413.
[22] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

1) Simpanan Giro (*demand deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.[23] Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, gito adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.[24]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 1/DSN-MUI/IV/2000, simpanan giro dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadiah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditawarkan oleh bank syariah dimana pihak ketiga dapat melakukan penarikan dananya setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

[23] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.
[24] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah pembayaran lainnya, maupun dengan cara pemindahbukuan.

b) Giro *Mudharabah*

Giro *Mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditawarkan oleh bank syariah dimana pihak ketiga dapat melakukan penarikan dananya hanya pada periode tertentu dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, maupun dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan (*saving*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati (antara bank dan nasabah), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[25] Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi

[25] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[26]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2/DSN-MUI/IV/2006, tabungan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

Tabel 2.1

Perbedaan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*[27]

No	Perbedaan	Tabungan *Wadi'ah*	Tabungan *Mudharabah*
1	Sifat dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi Hasil
4	Pengembalian modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditawarkan oleh bank syariah dimana pihak nasabah menitipkan sejumlah dananya kepada bank syariah dan penarikan dana tersebut dapat dilakukan setiap saat serta nasabah akan mendapatkan bonus (tanpa dipersyaratkan) dari bank syariah.

a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditawarkan oleh

[26] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 74.
[27] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah*..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank syariah dimana nasabah (*shahibul maal*) menyerahkan pengelolaan dana tabungannya kepada bank syariah (*mudharib*) dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan diakhir bulan serta nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan.

3) Deposito (*time deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[28] Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.[29]

Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang ditawarkan oleh bank syariah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

[28] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, 102.
[29] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin lama jangka waktu deposito akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan

Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai *agent of trust* yang berarti bahwa kelangsungan usaha perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang terletak pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dititipkan. Dengan kata lain, agar dapat menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat, bank syariah harus dapat meyakinkan nasabah bahwa dana yang dititipkan dalam bentuk simpanan dijamin keamanannya dan bank syariah dapat melayani nasabah dalam hal pengambilan tunai secara tepat waktu. Sedangkan apabila bank syariah tidak dapat memenuhinya, maka reputasi bank akan dipertaruhkan yang mengakibatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun menurun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat yang akhirnya akan mengoptimalkan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam hal penyaluran berbentuk pembiayaan, karena sumber dana pembiayaan perbankan syariah berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian *Return On Assets*

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Standart *Return On Assets* (ROA) yang baik menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu sekitar 1,5%. Nilai *Return On Assets* (ROA) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengelola aset secara optimal dalam hal penyaluran pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi karena pendapatan operasional yang diterima lebih tinggi daripada biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank.

b. Pendapatan Bank Syariah

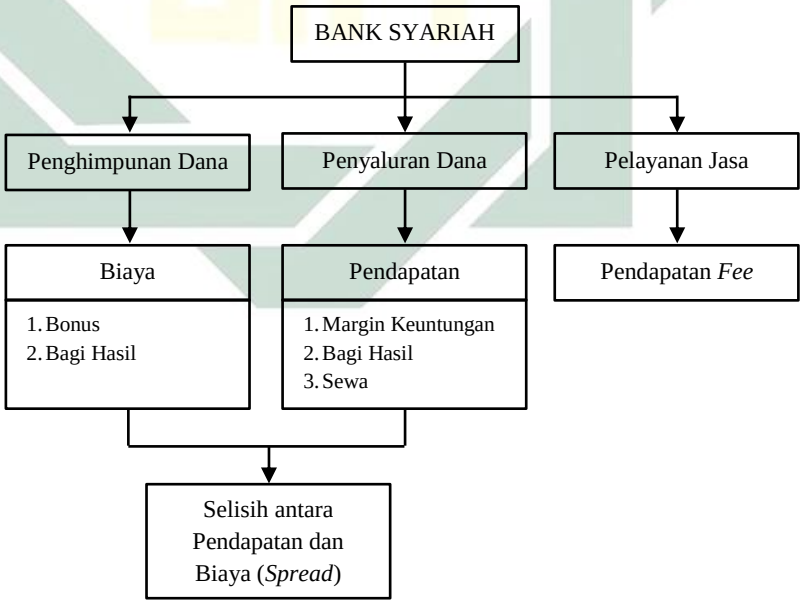

Gambar 2.4

Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah adalah badan usaha yang kegiatannya mengacu pada hukum atau syariat Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan maupun membayar bunga kepada nasabah, melaikan menerima dan membayar imbalan kepada nasabah tergantung dari perjanjian (akad) antara nasabah dan bank, dimana perjanjian (akad) tersebut harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*). Masyarakat yang kelebihan dana tersebut membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan maupun menginvestasikan dananya dengan aman. Selain demi keamanan dananya, masyarakat yang kelebihan dana juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas dana yang telah dititipkan atau diinvestasikan kepada bank syariah. *Return* adalah imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang dititipkan menggunakan akad *wadi'ah* berupa bonus maupun yang diinvestasikan menggunakan akad *mudharabah* berupa bagi hasil di bank syariah yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank serta tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank syariah. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar. Sebaliknya, apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang kecil, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah apabila dapat memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana tersebut, bank syariah akan memperoleh *return* atau pendapatan atas dana yang disalurkan tergantung dari akadnya. Akad dalam penyaluran dana antara lain akad jual beli dan akad kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya berupa margin keuntungan yang merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Sedangkan dalam akad kerjasama usaha, *return* yang diperoleh bank berupa bagi hasil. Apabila nasabah mendapat keuntungan yang besar, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Sebaliknya, apabila nasabah mendapatkan keuntungan yang kecil, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Return yang diberikan dan diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi karena sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, *return* yang diberikan dan diterima dihitung berdasarkan bunga yang dihitung dengan mengalikan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap.[30]

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah pelayanan jasa kepada nasabah yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Dari aktivitas pemberian pelayanan jasa tersebut, bank syariah dapat meningkatkan pendapatannya yang berasal dari *fee* atas jasa yang diberikan atau biasa disebut dengan *fee based income*. Meski secara total belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, *fee based income* tetap sangat diperlukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan. Produk pelayanan jasa yang dikembangkan oleh bank syariah antara lain ATM bersama, RTGS, *intercity kliring*, internet *banking*, SMS *banking*, dan produk pelayanan jasa lainnya.

Selisih antara pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah pembiayaan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar bank kepada nasabah yang menyimpan dan menginvestasikan dananya disebut dengan *spread*. Dalam bank syariah, pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil akan selalu lebih besar dibandingkan dengan biaya bonus dan bagi hasil sehingga bank syariah tidak akan mengalami *negatif spread*.

[30] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengaruh *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Nilai *Return On Assets* (ROA) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengelola aset secara optimal dalam hal penyaluran pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi.

5. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian ysng telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.[31] *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan perbankan syariah untuk mengukur atau menghitung pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam pengembaliannya berupa pokok pinjaman beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan terdapat kemungkinan tidak dapat ditagih.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain karena debitur yang kurang

[31] Ismail, *Manajemen Perbankan...*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakap dalam menjalankan usahanya, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dana yang dipinjamkan tidak cukup untuk menjalankan usahanya, kelemahan pihak manajemen bank dalam melakukan seleksi calon debitur, kurangnya sistem pengontrolan oleh pihak manajemen bank terhadap debitur, dan lainnya. Sedangkan aspek eksternal penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain karena aspek pasar yang kurang mendukung, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat yang kurang, dan lainnya.

Nilai *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah. Menurut Oktaviani (2012), saat terjadi pembiayan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat. Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kegiatan perbankan syariah yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank. Selain masalah solvabilitas berupa modal bank yang berkurang untuk menutupi pembiayaan bermasalah, masalah lain yang dapat ditimbulkan dari tingginya nilai *Non Performing Financing* (NPF) yaitu masalah likuiditas atau ketidakmampuan bank membayar pihak ketiga yang melakukan penarikan dana, serta masalah rentabilitas atau pembiayaan yang tidak bisa ditagih sehingga laba atau pendapatan perbankan syariah berkurang.[32]

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015, kriteria rasio *Non Performing Financing* (NPF) sama dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional yaitu dibawah 5%.[33]

Dalam penelitian ini, *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang memengaruhi pembiayaan karena mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah,

[32] Solihatun, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol* 12, 1 (2014), 58.
[33] H. Khatimah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008" *Jurnal Optimal Vol 3*, 1 (2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat.

b. Indikator Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang termasuk pembiyaan bermasalah yaitu pembiayaan yang sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Pembiayaan kurang lancar, yaitu pembiayaan yang telah mengalami tunggakan atau penundaan pembayaran pokok pinjaman dan margin yang melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
2) Pembiayaan diragukan, yaitu pembiayaan yang telah mengalami tunggakan atau penundaan pembayaran pokok pinjaman dan margin yang melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
3) Pembiayaan macet, yaitu pembiayaan yang telah mengalami tunggakan atau penundaan pembayaran pokok pinjaman dan margin yang melampaui 270 hari atau lebih.[34]

c. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

Nilai *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah. Menurut Oktaviani (2012), saat terjadi pembiayan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi

[34] Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat.

6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio keuangan yang mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank yang didapatkan dengan membandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga, sehingga dapat diduga bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang ditimbulkan dari tingginya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu masalah likuiditas. Jika suatu bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan dalam jumlah besar, maka bank tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk mengembalikan dana pihak ketiga yang ditarik, yang akhirnya akan berdampak pada hilangnya kepercayaan nasabah. Sebaliknya, jika suatu bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan hanya dalam jumlah kecil, maka bank kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, jika nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah berada pada standart yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pendapatan yang diperoleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, perbankan syariah dikatakan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik apabila nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak kurang dari 78% dan tidak lebih dari 100%.

Dapat disimpulkan bahwa, dengan melihat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dapat diketahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat dengan segera memenuhi permintaan pihak ketiga yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank yang didapatkan dengan membandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga, sehingga dapat diduga bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

7. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian Giro Wajib Minimum

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan tugas pokok yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Berkaitan dengan tugasnya di bidang moneter,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia menetapkan penggunaan salah satu instumen kebijakan moneter berupa Giro Wajib Minimum (GWM). Instrumen kebijakan tersebut pertama kali dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 1957 dengan nama Cadangan Minimum dan pada tahun 1968 berubah menjadi GWM. Giro Wajib Minimum (GWM) atau *Reserve Requirement Ratio* (RRR) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berkaitan dengan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas bank, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai GWM agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu oleh nasabah bank, baik penarikan dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut, penarikan dana melalui kliring, ataupun penarikan atau pencairan kredit dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan bank.

Dalam operasional perbankan, untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpannya, setiap bank wajib memelihara sejumlah dana sebagai cadangan (*cash reserve*) yang digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah sebagai penyangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

likuiditas. Namun, dana cadangan tersebut memungkinkan untuk digunakan sementara agar dana tersebut tidak menjadi dana yang tertahan (*idle fund*). Dana cadangan (*cash reserve*) tersebut terdiri dari dana primer (*primary reserve*) berupa saldo kas dan saldo rekening giro pada BI, serta dana sekunder (*secondary reserve*) yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi dana primer. Dana primer (*primary reserve*) pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh BI, transaksi dengan bank koresponden, penarikan dana oleh nasabah, permintaan kredit oleh masyarakat, dan kebutuhan untuk mendukung operasional sehari-hari.

Dari uraian diatas didapatkan bahwa terdapat tujuan ganda dari diterapkannya GWM sebagai salah satu alat pengendalian moneter baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, penerapan GWM menyebabkan selalu tersedianya dana siaga dari setiap bank untuk membayar kewajibannya berupa penarikan dana pihak ketiga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan secara makro, penerapan GWM dapat digunakan untuk menyerap ekses likuiditas yang berlebihan dari bank dalam rangka mencapai kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. GWM harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya dampak sistemik pada sistem perbankan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai GWM harus disesuaikan dari waktu ke waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cadangan likuiditas bank yang terlalu kecil dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan adanya beban biaya dan risiko akibat penjualan aset yang terburu-buru serta risiko gagalnya memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Sebaliknya, cadangan likuiditas bank yang terlalu besar dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bank. Oleh karena itu, manajemen likuiditas perbankan harus dikelola dengan baik untuk mengetahui perkiraan terhadap permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan dana yang mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kegagalan dalam pengelolaan manajemen likuiditas perbankan menyebabkan kemungknan tidak terpenuhinya minimal GWM yang ditetapkan oleh BI sehingga BI mengenakan sanksi berupa membayar denda dan sanksi administratif. Secara umum, bank memelihara giro sedikit lebih besar dari ketentuan GWM yang ditetapkan (*Excess Reserve*) dengan memperhatikan kebiasaan penarikan dan penyetoran oleh nasabah bank dengan tujuan berjaga-jaga dari hal yang tidak terduga.

Rasio-rasio umum yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank antara lain:

1. Rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh nasabah dengan menggunakan alat-alat likuid bank seperti saldo kas, saldo giro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Bank Indonesia dan bank koresponden. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik posisi likuiditas bank.

2. Rasio kredit atau pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), biasa disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin kurang baik posisi likuiditas bank.
3. Rasio-rasio surat berharga jangka pendek terhadap total portofolio surat-surat berharga. Semakin besar posisi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatu temponya kurang dari satu tahun terhadap total portofolio surat-surat berharga, maka semakin baik posisi likuiditas bank.

Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan GWM berbasis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bertujuan untuk mendorong bank untuk lebih aktif menyalurkan dananya dalam bentuk kredit karena apabila bank tidak mampu memenuhi LDR target, maka GWM yang ditetapkan memungkinkan untuk dinaikkan oleh Bank Indonesia.

Apabila GWM bank tersebut tinggi, maka akan berakibat kurang maksimalnya fungsi intermediasi beberapa bank yang berada dalam posisi likuiditas yang kurang cukup dan pada akhirnya akan meningkatnya biaya dana suatu bank. Biaya dana bank adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap Rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan GWM. Biaya dana biasa disebut dengan bunga simpanan pada perbankan konvensional. Apabila biaya bank mengalami kenaikan, bank akan mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga kredit dimana akan mengakibatkan bank kesulitan untuk menaikkan pertumbuhan kredit dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing bank. Sedangkan bagi bank syariah, jika GWM yang ditetapkan dinaikkan, maka tidak akan menguntungkan karena bank syariah tidak mendapatkan *return* apapun. Oleh karena itu, dengan mempertahankan nilai FDR di atas target, berarti fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik atau menandakan rendahnya jumlah dana menganggur pada bank karena penyaluran pembiayaan bank yang rendah.

b. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Pembiayaan

Perubahan ketentuan GWM berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh bank, dimana semakin rendah ketentuan GWM yang diwajibkan kepada bank akan menyebabkan semakin besar jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank pada saat jangka panjang. GWM merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang atau kebijakan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung dirasakan dampaknya. Sebaliknya, semakin tinggi ketentuan GWM menyebabkan semakin sedikit jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin sedikit jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Oleh karena itu, bank berusaha untuk meningkatkan pendapatnya agar dapat meningkatkan jumlah dana yang dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Perubahan ketentuan GWM juga berpengaruh terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank, dimana semakin tinggi ketentuan GWM yang diwajibkan kepada bank menyebabkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi bank karena bank mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabahnya sehingga akan terjadi peningkatan jumlah DPK pada jangka panjang. Selanjutnya, semakin besar jumlah DPK atau dana yang dipegang oleh bank menyebabkan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank pada saat jangka panjang.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF)¸ *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah di Indonesia" telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian tersebut diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul	Variabel	Hasil
1.	Muhammad Lutfhi Qolbi (2013), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia Periode 2007-2013*.	- DPK - SWBI - ROA	- DPK berpengaruh positif signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pembiayaan. - SWBI berpengaruh negatif signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pembiayaan. - ROA berpengaruh positif tidak signifikan pada jangka pendek dan berpengaruh positif signifikan pada jangka panjang terhadap pembiayaan.
2.	Fitri Suci Lestari (2012), *Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia Periode 2008-2011*.	- CAR - NPF - BOPO - ROA - ROE - DPK - FDR	- CAR dan BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. - NPF, FDR, dan ROE berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. - ROA dan DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan.
3.	Fahrul Rosi Hasi dan Yaya Sonjaya (2014), *Pengaruh DPK, FDR, dan ROA Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (BUS) Periode 2009-2013.*	- DPK - FDR - ROA	- DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. - ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
4.	Fauziyah Adzimatinur, Sri	- Tingkat bagi	- Tingkat bagi hasil, DPK, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Hartoyo, dan Ranti Wiliasih (2014), *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia Periode 2010-2013.*	hasil - DPK - FDR - NPF - ROA - BOPO	FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. - NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. - ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
5.	Isnu Nurrochman dan Mahfudz (2016), *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Pada BUS Periode 2012-2015.*	- DPK - FDR - ROA - NPF - Inflasi - BI Rate	- DPK, FDR, ROA, NPF, dan BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. - Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.
6.	Asri Pujiana (2017), *Pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2012-2016.*	- DPK - CAR - NPF - ROA	- DPK, NPF, dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. - CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan.
7.	Nurimansyah Setivia Bakti (2017), *Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (BUS) Periode 2013-2016.*	- DPK - CAR - ROA - NPF	- DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. - CAR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. - NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.
8.	Umiyati dan Leni Tantri Ana	- ROA	- ROA, NPF, dan Inflasi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(2016), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUS Devisa di Indonesia Periode 2011-2015.*	- NPF - Inflasi - DPK - FDR	berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. - DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel-variabel independennya. Pada penelitian ini, variabel independen berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Sedangkan data yang digunakan berupa data laporan triwulan statistik perbankan syariah periode tahun 2010 sampai dengan 2019.

C. Kerangka Konseptual

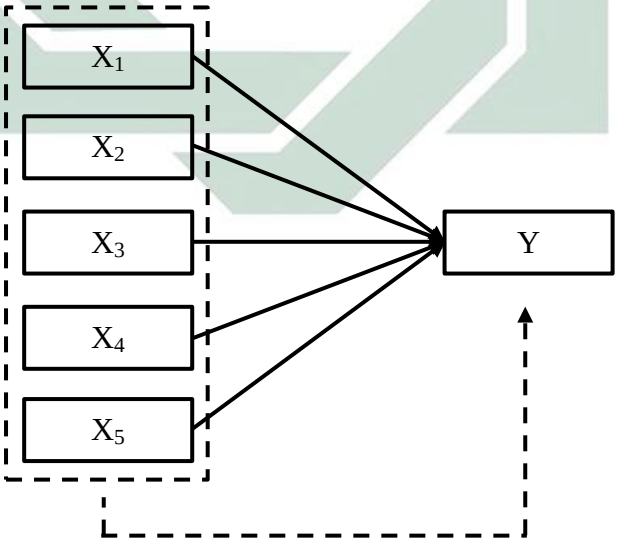

Gambar 2.5

Kerangka Konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

X_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X_2 : *Return On Assets* (ROA)

X_3 : *Non Performing Financing* (NPF)

X_4 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X_5 : Giro Wajib Minimum (GWM)

Y : Pembiayaan

D. Hipotesis

Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini, penulis menuliskan hipotesis sebagai berikut:

H_{01} : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Ha_1 : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

H_{02} : *Return On Assets* tidak berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Ha_2 : *Return On Assets* berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

H_{03} : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Ha_3 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_{04} : *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Ha_4 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

H_{05} : Giro wajib minimum tidak berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Ha_5 : Giro wajib minimum berpengaruh terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berjenis penelitian asosiatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[1] Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah asosiatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Dalam hal ini yaitu menyelidiki tentang faktor-faktor yang memengaruhi jumlah atau besaran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Faktor-faktor yang akan diteliti berasal dari sisi internal perbankan syariah yaitu berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan dari sisi eksternal perbankan syariah berupa kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan selesai. Penelitian ini dibatasi dengan

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa laporan triwulan perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa data statistik perbankan syariah dengan menggunakan data time series berupa data triwulan periode 2010 sampai dengan 2019.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi populasi adalah perbankan syariah di Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasinya) yang akan diteliti secara mendalam. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria pemilihan sampel, antara lain:

1. Perbankan Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2010-2019.
2. Perbankan Syariah yang menyampaikan laporan keuangan selama periode 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbankan Syariah yang melakukan 3 (tiga) fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa.
4. Rasio keuangan Perbankan Syariah berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPL), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) selama periode 2010-2019.

Berdasarkan kriteria diatas, sampel pada penelitian ini berupa laporan triwulan Perbankan syariah yang hanya meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), tanpa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut antara lain:

Tabel 3.1

Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2010-2019[2]

No	Bank Umum Syariah (BUS)	Periode			
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2010 sampai 2013	2014 dan 2015	2016 dan 2017	2018 dan 2019
2	PT. Bank Victoria Syariah				
3	PT. Bank BRISyariah				
4	PT. Jawa Barat Banten Syariah				
5	PT. Bank BNI Syariah				
6	PT. Bank Syariah Mandiri				
7	PT. Bank Mega Syariah				
8	PT. Bank Panin Syariah				
9	PT. Bank Syariah Bukopin				
10	PT. BCA Syariah				
11	PT. Maybank Syariah Indonesia				

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	PT. BTPN Syariah				
13	PT. Bank Aceh Syariah				
14	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah				
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS)		**11**	**12**	**13**	**14**

Tabel 3.2

Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2010-2019[3]

No	Unit Usaha Syariah (UUS)	Periode					
		2010	2011 dan 2012	2013	2014 dan 2015	2016 dan 2017	2018 dan 2019
1	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PT. Bank Permata, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	PT. BPD DKI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	PT. BPD Jawa Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	PT. BPD Jambi		✓	✓	✓	✓	✓
11	PT. BPD Sumatera Utara	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	PT. BPD Sumatera Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	PT. BPD Kalimantan Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	PT. BPD Kalimantan Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	PT. BPD Kalimantan Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	PT. Bank Sinarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21	PT. BPD Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	
22	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	✓	✓	✓	✓		
23	PT. BTPN	✓	✓	✓			
24	HSBC, Ltd.	✓	✓				
Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS)		**23**	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun itu yang ditetapkan oleh peneliti supaya dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian bisa diambil kesimpulannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel Independen

   Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel lain. Terdapat 5 variabel independen dalam penelitian ini, antara lain:

   X_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

   X_2 : *Return On Assets* (ROA)

   X_3 : *Non Performing Financing* (NPF)

   X_4 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

   X_5 : Giro Wajib Minimum (GWM)

2. Variabel Dependen

   Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

   Y : Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu keterangan yang berisi definisi dari tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen (X) yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPL), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM). Sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan yaitu Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

   Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimaksud adalah dana pihak ketiga berupa jumlah dana simpanan *wadiah*, dana investasi *nonprofit sharing*, dan dana investasi *profit sharing* yang diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

2. *Return On Assets* (ROA)

   Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Dalam penelitian ini, nilai *Return On Assets* (ROA) diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan perbankan syariah untuk mengukur atau menghitung pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam pengembaliannya berupa pokok pinjaman beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan terdapat kemungkinan tidak dapat ditagih. Dalam penelitian ini, nilai *Non Performing Financing* (NPF) diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio keuangan yang mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank yang didapatkan dengan membandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini, nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Giro Wajib Minimum (GWM)

Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam rangka mengontrol dan mengawasi sektor perbankan agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu yang akan berdampak pada kepercayaan nasabah. Dalam penelitian ini, nilai Giro Wajib Minimum (GWM) diambil secara langsung dari total Penempatan Pada Bank Indonesia dalam laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

6. Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) adalah jumlah dana yang disalurkan bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna dana. Dalam penelitian ini, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang dimaksud adalah pembiayaan berupa jumlah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna'*, piutang *qardh*, piutang *ijarah*, dan pembiayaan lainnya yang diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go,id.

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah suatu informasi yang digunakan dalam penelitian dengan memakai pengukuran khusus yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dimana data tersebut berupa angka yang dapat dihitung secara langsung. Data pada penelitian ini berupa data laporan statistik perbankan syariah periode 2010 sampai dengan 2019 berupa data nilai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPL), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara langsung dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk dokumen berupa laporan statistis perbankan syariah periode 2010 sampai dengan 2019.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yang bersumber dari website

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk data-data triwulan dari laporan statistis perbankan syariah periode 2010 sampai dengan 2019.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan program komputer yaitu *software Statistic Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21 untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang dalam mendukung penelitian adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

   Uji Asumsi Klasik adalah asumsi atau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berbasis kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) agar model regresi linear menjadi valid sebagai alat penduga. Model regresi linear dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias apabila telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE) yang dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik sebagai berikut:

   a. Uji Normalitas

      Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Uji statistik normalitas yang biasa digunakan antara lain *Chi-Square*, *Kolmogorov-Smirnov*, *Liffiefors*, *Jarque Bera*, dan *Shapiro Wilk*.[4] Sedangkan dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan dasar pengambilan keputusan yang melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Cara pengambilan keputusan uji normalitas dalam penelitian ini yaitu:

1) Jika Nilai Probabilitas > 0,05, maka variabel berdistribusi normal.
2) Jika Nilai Probabilitas < 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas atau kolinieritas ganda adalah terdapat hubungan yang linier diantara variabel independen. Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.[5] Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika antara variabel independen berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara variabel independen lainnya sama dengan nol.

[4] Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 57.
[5] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Cara pengambilan keputusan uji multikolinieritas dalam penelitian ini yaitu:

1) Jika Nilai *Tolerance* > 0,1, maka model penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika Nilai *Tolerance* < 0,1, maka model penelitian terjadi masalah multikolinieritas.
2) Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka model penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka model penelitian terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.[6] Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW) untuk menguji apakah terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian.Cara pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan pengujian *Durbin-Watson* yaitu:

[6] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Ketentuan Pengujian *Durbin Watson*

Posisi Nilai DW	Keputusan
$d < d_L$	Terdapat masalah autokorelasi dan perlu perbaikan
$4-d_L < d$	
$d_L < d < d_U$	Terdapat masalah autokorelasi lemah dan perbaikan akan lebih baik
$4-d_U < d < 4-d_L$	
$d_U < d < 4-d_U$	Tidak terdapat masalah autokorelasi

Nilai batas bawah (d_U) dan batas atas (d_L) didapatkan dari tabel statistik *Durbin-Watson* dengan melihat nilai signifikansi (p), jumlah sampel (n), dan jumlah variabel independen (k) yang digunakan dalam penelitian.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.[7] Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola pada Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Cara pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu:

[7] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jika terdapat pola tertentu yaitu titik-titik membentuk pola bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak terdapat pola yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengidentifikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Bentuk persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y	: Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)
b_0	: Konstanta atau *Intercep*
X_1	: Dana Pihak Ketiga (DPK)
X_2	: *Return On Assets* (ROA)
X_3	: *Non Performing Financing* (NPF)
X_4	: *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
X_5	: Giro Wajib Minimum (GWM)
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	: Koefisien regresi variabel X_1, X_2, X_3, X_4, dan X_5
e	: *Standart error*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 ditolak, sedangkan perhitungan statistik dikatakan tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada daerah dimana H_0 diterima. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.[8] Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu), dimana nilai R^2 yang kecil berarti terbatasnya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan kata lain, semakin besar nilai R^2 berarti semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen.

[8] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi simultan yaitu apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan uji signifikansi simultan (Uji F), yaitu:

1) Menentukan hipotesis

H_0 : Seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

H_a : Seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

2) Menentukan taraf signifikansi, yaitu α = 5% atau 0,05.

3) Menentukan nilai F tabel dengan mencari nilai df_1 dan df_2 dengan perhitungan F tabel = $f(df_1;df_2)$ = f(k;n-k-1), dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah jumlah sampel atau data. Hasil perhitungan tersebut dilihat pada tabel distribusi F sehingga mendapatkan nilai F tabel.

4) Menentukan nilai F hitung

Cara pengambilan keputusan dalam Uji F, yaitu:

a) Jika nilai F > 4, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika nilai F < 4, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b) Jika nilai F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika nilai F hitung < F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi parsial yaitu apakah tiap-tiap variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan uji signifikansi parsial (Uji t), yaitu:

1) Menentukan hipotesis

H_0 : Variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : Variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Menentukan taraf signifikansi, yaitu α = 5% atau 0,05.

3) Menentukan nilai t tabel dengan mencari nilai α/2 dan db dengan perhitungan t tabel = t(α/2;db) = t(α/2;n-k-1), dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah jumlah sampel atau data. Hasil perhitungan tersebut dilihat pada tabel distribusi t sehingga mendapatkan nilai t tabel.

4) Menentukan nilai t hitung

Cara pengambilan keputusan dalam Uji t, yaitu:

a) Jika nilai t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

b) Jika nilai t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, masyarakat muslim Indonesia menginginkan transaksi keuangan yang sesuai syariat Islam dengan hadirnya perbankan syariah. Hadirnya perbankan syariah sebenarnya sudah menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia merdeka. K.H. Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 bahkan pernah menyatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia terpaksa menggunakan jasa lembaga perbankan konvensional karena belum tersedianya lembaga perbankan syariah yang bebas dari riba di Indonesia.

Pada awal tahun 1980, Indonesia mulai mengadakan diskusi mengenai pendirian bank syariah dan melakukan uji coba dalam bentuk pendirian *Baitut Tamwil-Salman* di Bandung dan Koperasi *Ridho Gusti* di Jakarta. Pada tahun 1980-an, pemerintah tidak dapat mengendalikan tingkat suku bunga bank yang tinggi karena sangat bergantungnya bank-bank yang ada terhadap likuiditas Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar terciptanya kondisi bank yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian, pada 1 Juni 1983 Bank Indonesia melakukan deregulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan dengan memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga sebesar 0% dan melakukan penerapan sistem bagi hasil yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis perbankan untuk mendirikan bank-bank baru atau liberalisasi sistem perbankan dengan tujuan untuk menunjang pembangunan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, bank yang berasaskan syariah juga mulai berdiri di beberapa daerah di Indonesia.

Pada tahun 1990-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, dimana prakarsa tersebut diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian. pada 22-25 Agustus 1990 diselenggarakan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (Munas IV MUI) di Jakarta untuk membahas hasil dari lokakarya secara lebih mendalam dan menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia yang disebut dengan Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja dari Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sesuai dengan akte pendiriannya yaitu pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Selain BMI, pada tahun 1991 juga berdiri BPR Dana *Mardhatillah* dan BPR Berkah Amal Sejahtera di Bandung yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development* (ISED).

Di awal bank syariah beroperasi, bank syariah belum dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia dikarenakan pemerintah saat itu belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah maupun menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Semenjak tahun 1992, terdapat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang menyebutkan pengertian dari bank dengan sistem bagi hasil tanpa terdapat rincian landasan hukum syariah, jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan operasional, dan berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah lainnya. Sehingga, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk perkembangan bank syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank dengan sistem bagi hasil yang selanjutnya harus mengikuti peraturan-peraturan yang digunakan oleh perbankan konvensional. Karena harus mengikuti peraturan perbankan konvensional, kebutuhan masyarakat muslim terhadap transaksi keuangan yang sesuai syariat Islam belum terpenuhi dengan baik karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatasnya produk yang pada umumnya justru mirip produk-produk bank konvensional yang “disyariahkan”.

Minimnya dukungan pemerintah serta bank syariah yang belum memiliki institusi-institusi pendukung mengakibatkan bank syariah mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, perkembangan bank syariah juga lambat karena bank syariah hanya dapat tumbuh melalui perluasan bank yang sudah ada atau melalui pembukaan bank syariah baru yang tentunya membutuhan investasi dengan jumlah besar. Sebaliknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) justru berkembang pesat karena kebutuhan investasi yang jauh lebih kecil. Sampai dengan tahun 1998, bank syariah di Indonesia hanya ada 1 (satu) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta. Sementara BPRS berjumlah 76 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Tahun 1998 adalah tahun bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemerintah memberikan komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah secara penuh. Terdapat perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dengan tegas menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sistem dalam perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah, dimana keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat perizinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Bank Indonesia terhadap Bank Umum Konvensional (BUK) yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Kantor Cabang Syariah (KCS), serta ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan adanya dukungan pemerintah dengan berlakunya undang-undang dan ketentuan-ketentuan diatas, maka landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat sehingga diharapkan perkembangan perbankan syariah menjadi lebih pesat. Pada tahun 1998 pula Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan bangkrutnya belasan bank konvensional, namun tidak dengan satu-satunya bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada tahun 1999, pemerintah melanjutkan komitmennya untuk mengembangan perbankan syariah dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang bank sentral yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 8 undang-undang tesebut, tertulis bahwa Bank Indonesia memiiki 3 (tiga) tugas pokok dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank syariah. Hal ini berarti pemerintah melalui Bank Indonesia semakin mendukung pengembangkan perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah melalui penyusunan ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Selanjutnya, dengan melihat kuatnya BMI dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998, Bank Indonesia membentuk tim peneliti perbankan syariah. Hasilnya, berdirilah bank syariah kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan gabungan dari beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terimbas krisis ekonomi, serta Unit Usaha Syariah (UUS) juga mulai bermunculan.

Selanjutnya, di tahun 2000 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Pada tahun 2001, Bank Indonesia mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) yang bertugas untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, urusan yang ditangani oleh BPRS juga semakin banyak sehingga BPS memerlukan SDM yang lebih banyak serta struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, BPS diperbesar menjadi direktorat yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) pada akhir tahun 2003. Selain itu, di akhir tahun pula MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram sehingga menyebabkan masyarakat muslim yang loyalis syariah memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada 16 Juli 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah nasional secara lebih cepat lagi. Terbukti bahwa hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2009-2010, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia meningkat dari 5 BUS menjadi 11 BUS. Pada 13 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selaku otoritas di sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah. Pada Pasar Rakyat Syariah 2014, OJK meluncurkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015-2019 yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan OJK.

2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1925, Amerika Serikat menetapkan undang-undang yang memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan kredit kepemilikan rumah sehingga banyak lembaga pembiayaan menyalurkan kredit properti kepada masyarakat yang secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kredit yang dilakukannya. Untuk memenuhi kebutuhan kredit tersebut, lembaga pembiayaan secara umum meminjam dana jangka pendek kepada lembaga keuangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan surat utang yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Karena ketidakmampuan kreditur dalam membayar kewajibannya, terjadilah kredit macet dan lembaga pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan sehingga likuiditas lembaga-lembaga keuangan tersebut terkuras dan terancam bangkrut. Kondisi lembaga keuangan Amerika Serikat tersebut memengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain bahkan di luar Amerika Serikat dan menjadi permulaan adanya krisis ekonomi global di tahun 2008.

Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 tersebut berdampak pada kondisi ekonomi di seluruh negara. Di Indonesia, dampak krisis ekonomi global mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi 6,1 persen (yoy), dimana sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy) di triwulan I, 6,4 persen (yoy) di triwulan II, dan sebesar 6,4 persen (yoy) di triwulan III. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh menurunnya nilai tukar rupiah menjadi Rp. 12.151,-/USD pada November 2008 serta menurunnya neraca perdagangan nasional karena peningkatan ekspor yang lebih rendah dari peningkatan impor sebagai dampak dari melemahnya permintaan global. Namun, di sektor keuangan justru ketahanan sektor perbankan nasional masih cukup kuat dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mengalami pertumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 30,7 persen (yoy) dan perbankan syariah sendiri mengalami pertumbuhan pembiayaan mencapai 36,5 persen (yoy).

Krisis ekonomi global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV tahun 2008 masih dirasakan dampaknya oleh negara Indonesia sampai dengan triwulan I tahun 2009. Pada awal tahun 2009, terjadi ketidakpastian terkait seberapa dalam kontraksi global dan seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, dimana ketidakpastian tersebut menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan dan juga berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi di sektor rill domestik. Tingginya risiko di pasar keuangan global disebabkan oleh kinerja lembaga-lembaga keuangan terkemuka yang memburuk sehingga mengakibatkan tekanan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I tahun 2009.

Bank Indonesia dan Pemerintah sepanjang tahun 2009 telah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, mengatasi permasalahan likuiditas di perbankan, dan memperkuat kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dalam bidang perbankan yaitu menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomer 6 tahun 2009 yang ditempuh dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan likuiditas perbankan, serta menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan *structured product*. Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencapai 4,5% (yoy) yang mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia telah mampu melewati tantangan pada tahun 2009. Dengan itu, Indonesia semakin optimis terhadap berlanjutnya proses perbaikan kondisi perekonomian yang juga didukung oleh membaiknya prospek pemulihan ekonomi global.

Proses perbaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari sisi eksternal maupun sisi internal atau domestik. Pada sisi eksternal, tantangan yang dapat menghambat akselerasi perbaikan ekonomi Indonesia antara lain berupa tantangan yang berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh di masa krisis, seperti pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Sedangkan pada sisi internal atau domestik berupa tantangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti besarnya ekses likuiditas perbankan, besarnya peran investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, munculnya potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, dangkalnya pasar keuangan, serta berbagai permasalahan struktural di sektor riil.

Pada tahun 2008, Bank Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kejelasan aspek hukum, berisi beberapa kebijakan seperti posisi Unit Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah (UUS) dalam 15 tahun kedepan, serta kejelasan kewenangan penyelesaian persengketaan dalam perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menegaskan perlakuan perpajakan bagi pembiayaan dengan sistem jual beli pada perbankan syariah. Semenjak diterbitkannya undang-undang tersebut, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat. Berikut merupakan indikator utama perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Tabel 4.1

Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia

Tahun 2010-2019[1]

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aset BUS-UUS	97,52	145,47	195,02	242,28	272,34	296,26	356,49	424,18	477,33	524,56
Aset BPRS	2,74	3,52	4,69	5,83	6,57	7,74	9,16	10,84	12,36	13,76
Total Aset	**100,26**	**148,99**	**199,71**	**248,11**	**278,92**	**304,00**	**365,66**	**435,02**	**489,69**	**538,32**
DPK BUS-UUS	76,04	115,42	147,51	183,53	217,86	231,17	279,34	334,72	371,82	416,56
DPK BPRS	1,60	2,10	2,94	3,67	4,03	4,80	5,82	6,99	8,13	8,73
Total DPK	**77,64**	**117,51**	**150,45**	**187,19**	**221,89**	**235,98**	**285,16**	**341,71**	**379,96**	**425,29**
PYD BUS-UUS	68,18	102,66	147,51	184,12	199,33	212,96	248,01	285,69	320,19	335,18
PYD BPRS	2,06	2,68	3,55	4,43	5,01	5,77	6,66	7,76	9,08	9,94
Total PYD	**70,24**	**105,34**	**151,06**	**188,55**	**204,31**	**218,72**	**254,67**	**293,46**	**329,28**	**365,13**

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global pada tahun 2010, kinerja perekonomian Indonesia justru mengalami perbaikan sehingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan PDB, surplusnya neraca pembayaran, dan semakin membaiknya kinerja sektor keuangan. Namun, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, meningkatnya inflasi, berbagai permasalahan di sektor perbankan, serta berbagai kendala di sektor rill.

Sepanjang tahun 2010, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang perbankan yaitu penguatan struktur permodalan bank, peningkatan kompetensi pengelola bank, pemantapan sistem pengawasan bank, pendalaman pasar keuangan, serta penyempurnaan beberapa aturan seperti penyempurnaan sistem pelaporan, rencana bisnis bank, dan posisi devisa neto, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tahan industri perbankan dan mendorong peran intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, pada tahun 2010 juga terdapat pengaturan perpajakan yang lebih kondusif, peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, dan semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah. Berbagai usaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah tersebut menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun 2010, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar Rp. 100,26 triliun, Rp. 77,64 triliun, dan Rp. 70,24 triliun. Aset perbankan syariah sebesar Rp. 100,26 triliun tersebut dikontribusikan oleh komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar Rp. 97,52 triliun.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2011, perkembangan makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang kuat sehingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5% (yoy) dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Bahkan di bidang perbankan syariah, selama tahun 2011 perbankan syariah pernah mengalami pertumbuhan Aset tertinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai 49,16% (yoy) yaitu pada bulan Oktober 2011. Pada akhir tahun 2011, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar Rp. 148,99 triliun, Rp. 117,51 triliun, dan Rp. 105,34 triliun. Aset perbankan syariah sebesar Rp. 148,99 triliun tersebut dikontribusikan oleh komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar Rp. 145,47 triliun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2012, di tengah ketidakpastian dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, lingkungan makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia justru kondusif dan stabil sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga sebesar 6,3% (yoy). Meskipun tidak setinggi yang diharapkan, namun Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja perbankan yang membaik ditinjau dari tetap tingginya ekspansi kredit dan eksposur risiko yang dikelola dengan baik. Sepanjang tahun 2012, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang perbankan yaitu pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta penguatan fungsi perbankan, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keseimbangan eksternal.

Pada akhir tahun 2012, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 34,04% (yoy) menjadi Rp. 199,71 triliun, 28,03% (yoy) menjadi Rp. 150,45 triliun, dan 43,41% (yoy) menjadi Rp. 151,06 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 34,04% (yoy) menjadi Rp. 199,71 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 34,06% (yoy) menjadi sebesar Rp. 195,02 triliun, lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 49,16% (yoy).

Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan di tahun 2013, kondisi ekonomi global justru mengalami perubahan berupa pasokan likuiditas ke negara-negara berkembang yang berkurang seiring dengan stimulus moneter negara maju yang juga berkurang dan terjadi pertumbuhan *emerging market* seperti di China dan India yang memicu penurunan harga komoditas dan menekan permintaan ekspor dari Indonesia. Perubahan kondisi ekonomi global selama tahun 2013 tersebut mengancam stabilitas makroekonomi Indonesia seperti neraca pembayaran yang tidak seimbang, depresiasi nilai tukar rupiah, dan inflasi yang meningkat sehingga Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% (yoy) pada tahun 2013, lebih rendah daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,3% (yoy). Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan bagian dari proses *rebalancing*, dampak lanjutan dari perlambatan ekonomi dan krisis keuangan yang masih terasa, proses konsolidasi yang membutuhkan fokus dan investasi yang lebih memadai, serta melemahnya investasi sejak awal tahun karena persepsi keyakinan pelaku bisnis terhadap perlambatan ekonomi yang menurun.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pada 9 Desember 2013, Pemerintah menaikkan tarif pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan atas impor barang tertentu dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang bertujuan untuk menekan impor. Sedangkan Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial. Hasil dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah yaitu cadangan devisa yang meningkat, tingkat inflasi yang menurun, cukup baiknya perinkat Indonesia pada lembaga pemeringkat internasional, serta meningkatnya peringkat tujuan investasi dan *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Perbaikan berbagai indikator perekonomian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh mampu mendorong ekonomi bergerak lebih seimbang, mengembalikan stabilitas makroekonomi, dan dapat menopang stabilitas sistem keuangan selama 2013.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Namun, pertumbuhan perbankan syariah yang melambat diperkirakan tidak terjadi karena adanya tekanan eksternal, melainkan terjadi karena adanya persaingan dalam memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan perbankan konvensional. Skala perbankan syariah yang masih menengah-kecil belum mampu mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, apalagi dalam kondisi suku bunga dengan tren yang meningkat mengikuti kenaikan BI rate.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir tahun 2013, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 24,24% (yoy) menjadi Rp. 248,11 triliun, 24,43% (yoy) menjadi Rp. 187,19 triliun, dan 24,82% (yoy) menjadi Rp. 188,55 triliun, dimana pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional Indonesia maupun perbankan syariah secara global. Pertumbuhan Aset pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan syariah tahun sebelumnya sebesar 34,04% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan nasional. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 24,24% (yoy) menjadi Rp. 248,11 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 24,23% (yoy) menjadi sebesar Rp. 242,28 triliun, dimana pertumbuhan Aset BUS dan UUS tersebut terjadi karena optimalnya pelaksanaan fungsi intermediasi yang tercermin dari pertumbuhan dan nominal Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tumbuh di atas 5,5% (yoy). Namun, pada tahun 2014 hanya tumbuh sebesar 5,02% (yoy), melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,8% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut, disebabkan karena perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia pada tahun 2014 dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, baik bersumber dari global maupun dari domestik. Tantangan yang bersumber dari global berupa lambatnya proses pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai dengan perkiraan dan penurunan harga komoditas internasional. Sedangkan tantangan yang bersumber dari domestik yaitu berupa ekspektasi inflasi yang cukup tinggi, defisit neraca transaksi berjalan, dan terus berlangsungnya proses penyesuaian atau reformasi struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, dan insfrastruktur domestik.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas dan menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui 2 (dua fase), yaitu fase pertama berupa bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial bias ketat dengan menetapkan BI Rate sebesar 7,5% yang diterapkan sampai dengan 17 November 2014 dan fase kedua berupa BI Rate yang dinaikkan menjadi 7,75% yang diterapkan mulai 18 November 2014, dimana kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam rangka penghematan belanja karena penerimaan negara yang menurun. Penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan daya dukung fiskal perekonomian akan menurun. Selanjutnya, dengan bertambahnya ruang fiskal diharapkan mampu memberikan stimulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkesinambungan.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, kinerja perbankan nasional masih menunjukkan *trend* pertumbuhan yang baik dan tetap solid dengan mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 13,4% (yoy), 12,3% (yoy), dan 13,4% (yoy). Pada tahun 2014, Bank Umum Konvensional (BUK) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 13,34% (yoy) menjadi Rp. 5.615 triliun, 12,29% (yoy) menjadi Rp. 4.114 triliun, dan 11,58% (yoy) menjadi Rp. 3.674 triliun. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 16,16% (yoy), 16,29% (yoy), dan 15,57% (yoy).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional menimbulkan adanya sedikit ketidakpastian (*uncertainty*) dalam bisnis. Ketidakpastian tersebut turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*, dimana penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga disebabkan karena adanya proses perbaikan, konsolidasi internal di tengah kecenderungan NPF yang tinggi, dan optimalisasi *business model* dan jaringan kantor yang terjadi di beberapa bank syariah. Pada akhir tahun 2014, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan PYD masing-masing sebesar 12,42% (yoy) menjadi Rp. 278,92 triliun, 18,53% (yoy) menjadi Rp. 221,89 triliun, dan 8,37% (yoy) menjadi Rp. 204,31 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 12,42% (yoy) menjadi sebesar Rp. 278,92 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 12,41% (yoy) menjadi sebesar Rp. 272,34 triliun. Penyediaan produk dan layanan keuangan syariah yang ditunjang oleh infrastruktur grup, strategi promosi, dan edukasi dibidang keuangan syariah merupakan upaya perbankan syariah yang memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2014 tersebut.

Pada tahun 2015, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% (yoy), melambat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy) dan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan tersebut, disebabkan karena perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan yang cukup berat, baik bersumber dari global maupun dari domestik. Tantangan yang bersumber dari global berupa pemulihan ekonomi global yang berlangsung lambat dan tidak merata. Ekonomi di zona Euro dan Jepang mengalami pemulihan yang terbatas, sehingga membuat otoritas negara maju mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi. Di Tiongkok, perbaikan kondisi ekonomi tetap melambat dan belum stabil. Sedangkan di Amerika Serikat, perbaikan kondisi ekonomi semakin membaik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pada akhir tahun *The Fed* atau Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan *Fed Funds Rate*. Isu kenaikan *Fed Funds Rate* telah berlangsung dari tahun 2014, namun sampai dengan tahun 2015 kenaikan *Fed Funds Rate* belum terealisasi. Isu tersebut telah memengaruhi pergerakan dana-dana investor asing di Asia terutama di Indonesia sehingga nilai tukar rupiah sempat melemah antara Rp. 13.500 sampai dengan Rp. 14.800 dan pada akhirnya berdampak kepada kenaikan harga barang di dalam negeri atau inflasi. Tantangan yang bersumber dari global lainnya yaitu berupa penurunan harga komoditas minyak dari negara-negara berkembang yang diiringi dengan melimpahnya suplai sehingga menekan harga minyak. Sedangkan tantangan yang bersumber dari domestik yaitu berupa adanya musibah kebakaran hutan dan asap yang menyelimuti sebagian besar kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan sehingga menelan biaya pemulihan setara 2 (dua) kali biaya pemulihan Aceh pasca tsunami di tahun 2004 yaitu Rp. 221 triliun atau hampir 1,9% dari PDB, penyesuaian terkait pengurangan subsidi bahan bakar, dan pembangunan infrastruktur domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, produktifitas sektor riil (industri dan pariwisata), dan aktivitas lembaga keuangan. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan yang pro sektor rill seperti perdagangan, investasi, dan lainnya. Bank indonesia menjalankan kebijakan dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi. Sedangkan OJK menjalankan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem dan lembaga keuangan. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut terjaganya stabilitas makroekonomi, rendahnya inflasi, sistem keuangan yang semakin baik. Pada awal tahun 2015, inflasi nasional tercatat sebesar 6,96% dan meningkat menjadi 7,26% selama bulan Juni dan Juli. Setelah dilakukan langkah perbaikan kinerja ekonomi nasional, inflasi nasional turun menjadi 6,25% pada bulan Oktober 2015 dan sebesar 3,35% pada akhir tahun 2015. Sedangkan neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan dari defisit 3,1% dari PDB di tahun 2014 menjadi defisit 2,1% dari PDB di tahun 2015.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, kinerja perbankan nasional juga cenderung melambat dengan mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 9,21% (yoy), 7,26% (yoy), dan 10,44% (yoy). Pertumbuhan Aset perbankan nasional tersebut menurun daripada tahun 2014 sebesar 13,34% (yoy) dan merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, Bank Umum Konvensional (BUK) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 9,53% (yoy) menjadi Rp. 5.919 triliun, 7,56% (yoy) menjadi Rp. 4.238 triliun, dan 10,86% (yoy) menjadi Rp. 3.904 triliun. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10,82% (yoy) menjadi Rp. 101,7 triliun, 11,89% (yoy) menjadi Rp. 67,3 triliun, dan 9,12% (yoy) menjadi Rp. 74,8 triliun.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*. Pada akhir tahun 2015, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 8,99% (yoy) menjadi Rp. 304 triliun, 6,35% (yoy) menjadi Rp. 236,02 triliun, dan 7,06% (yoy) menjadi Rp. 218,72 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 8,99% (yoy) menjadi sebesar Rp. 304 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 8,78% (yoy) menjadi Rp. 296,26 triliun.

Di tengah masih melambatnya perekonomian global terutama negara-negara maju pada tahun 2016, perekonomian Indonesia justru mulai memperlihatkan arah perbaikan. Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,02% (yoy) dan lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,79% (yoy). Membaiknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh berjalannya berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, produktifitas lintas sektor riil, dan aktivitas lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan. Pemerintah sendiri menjalankan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, program *tax amnesty*, serta mempercepat pembangunan nasional. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut yaitu berjalannya proyek pembangunan infrastruktur nasional, membaiknya kinerja ekspor nasional, implementasi Undang-Undang pengampunan pajak yang di respon positif, terjaganya stabilitas keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung stabil di antara Rp. 12.991 sampai dengan Rp. 14.061 dan menguat di akhir tahun sebesar Rp. 13.503, serta inflasi yang terjaga di angka 3,02%.

Seiring dengan terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sistem keuangan Indonesia juga semakin membaik, dimana kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi stabil dengan tren meningkat, kinerja pasar keuangan domestik dikategorikan cukup baik, tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan terjaga, serta ketahanan sistem keuangan sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional relatif terjaga. Pada tahun 2016, pertumbuhan Aset perbankan nasional tumbuh sebesar 10,41% (yoy) dengan total Aset mencapai Rp. 6.843 triiun. Pertumbuhan Aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset tahun 2015 sebesar 9,21% (yoy).

Kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan membaiknya kinerja keuangan nasional berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah, sejalan dengan karakteristiknya yang *real sector driven*. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan, pada akhir tahun 2016 perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 20,28% menjadi Rp. 365,66 triliun, 20,84% menjadi Rp. 285,2 triliun, dan 16,41% menjadi Rp. 254,7 triliun.

Aset perbankan syariah pada tahun 2016 yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat tumbuh 20,28% (yoy) menjadi sebesar Rp. 365,66 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 8,99% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan Aset yang mengalami peningkatan, pangsa perbankan syariah secara keseluruhan terhadap industri perbankan nasional juga meningkat dari sebesar 4,83% menjadi sebesar 5,33% pada tahun 2016. Sedangkan Aset komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri tercatat tumbuh 20,33% (yoy) menjadi sebesar Rp. 356,49 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 8,78% (yoy). Sedangkan Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan 18,33% (yoy) menjadi sebesar Rp. 9,16 triliun.

Pada tahun 2017, perekonomian global menunjukkan perbaikan yang tercermin dari membaiknya pertumbuhan ekonomi 5 (lima) negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan PDB terbesar di dunia yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman. Perbaikan perekonomian tersebut didukung oleh adanya peningkatan investasi, aktivitas manufaktur, perdagangan global, dan ekspor di negara-negara berkembang. Selain itu, reformasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara eksportir minyak setelah jatuhnya harga minyak dunia juga merupakan pendukung perbaikan perekonomian global pada tahun 2017.

Kondisi ekonomi global yang membaik tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global hingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% (yoy), meningkat daripada pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh inflasi yang terjaga pada 3,61%, nilai tukar rupiah terhadap USD yang stabil pada Rp. 13.323 sampai Rp.13.563, neraca perdagangan yang surplus sebesar US$11,88 miliar, nilai ekspor yang meningkat menjadi sebesar US$168,81 (sebelumnya sebesar US$145,18 miliar), nilai impor yang meningkat menjadi sebesar US$156,92 miliar (sebelumnya sebesar US$135,65 miliar), serta investasi yang meningkat sebesar dari Rp. 612,83 triliun menjadi Rp. 692,80 triliun pada tahun 2017.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kinerja perbankan nasional justru menunjukkan pertumbuhan yang menurun dengan mencatatkan pertumbuhan Aset sebesar 9,80% (yoy) menjadi Rp. 7.523,93 triiun, lebih rendah daripada pertumbuhan Aset tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 10,41% (yoy). Kondisi perekonomian nasional yang kondusif turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*. Pada akhir tahun 2017, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 18,97% (yoy) menjadi Rp. 435,02 triliun, 19,89% (yoy) menjadi Rp. 342 triliun, dan 15,24% (yoy) menjadi Rp. 293 triliun. Meskipun pertumbuhan Aset perbankan syariah lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 20,28%, Aset perbankan syariah tersebut tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan nasional yang hanya sebesar 9,80% (yoy). Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 18,97% (yoy) menjadi sebesar Rp. 435,02 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 18,37% (yoy) menjadi sebesar Rp. 424,18 triliun.

Pada tahun 2018, kinerja perekonomian Indonesia membaik dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2015 yaitu sebesar 5,18% (yoy), meningkat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh inflasi yang terjaga pada 3,13%, nilai tukar rupiah terhadap USD yang menguat menjadi Rp. 14.555 sehingga menjadikan Rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di dunia, serta PDB per-kapita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang meningkat sebesar 7,93% dari tahun 2017 hingga mencapai Rp. 56 juta pada akhir tahun 2018.

Kondisi perekonomian nasional yang kondusif serta kinerja keuangan nasional yang membaik memengaruhi pertumbuhan industri keuangan syariah yang terdiri dari 3 (tiga) sub-sektor yaitu perbankan syariah, Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, dan pasar modal syariah. Total Aset keuangan syariah sebesar Rp. 1.129,77 triliun pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,97% (yoy) menjadi Rp. 1.287,65 triliun pada tahun 2018. 38,03% dari total Aset keuangan syariah tersebut disumbangkan oleh Aset perbankan syariah sebesar Rp. 489,69 triliun. Pada akhir tahun 2018, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 12,57% (yoy) menjadi Rp. 489,69 triliun, 11,20% (yoy) menjadi Rp. 379,96 triliun, dan 12,21% (yoy) menjadi Rp. 329,28 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 12,57% (yoy) menjadi Rp. 489,69 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 12,53% (yoy) menjadi sebesar Rp. 477,33 triliun.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global melambat yang dipengaruhi oleh terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok di sepanjang tahun 2019 sehingga menyebabkan volume perdagangan global, produksi manufaktur, dan investasi yang mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2019, terjadi kesepakatan perdagangan fase I antara AS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tiongkok sehingga menyebabkan penurunan tekanan di pasar keuangan global. Selain itu, di akhir tahun 2019 juga terjadi kebijakan akomodatif beberapa negara yang mendorong aliran modal ke negara berkembang mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 yang melambat tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih rendah daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,18% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh melambatnya konsumsi, investasi, serta ekspor dan impor yang masih tertekan.

Konsumsi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi tahun sebelumnya sebesar 5,14%, dimana pertumbuhan konsumsi tersebut disebabkan oleh terselenggaranya Pemilu 2019 yang menyebabkan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) meningkat, rendahnya tingkat inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat terjaga, dan keyakinan konsumen yang tetap optimis dengan IKK sebesar 126,4. Investasi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah daripada pertumbuhan investasi pada tahun sebelumnya, dimana melambatnya pertumbuhan investasi tersebut disebabkan oleh investasi non-bangunan yang melambat dengan impor barang modal dan penjualan alat berat yang menurun. Namun, pertumbuhan investasi bangunan cukup baik yang didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan proyek properti swasta. Kinerja ekspor pada tahun 2019 terkontraksi sebesar -0,87% (yoy), daripada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55% (yoy), dimana penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh penurunan volume perdagangan global karena penurunan permintaan khususnya dari Tiongkok, serta adanya kebijakan beberapa negara yang melakukan restriksi perdagangan seperti India dan Tiongkok. Sedangkan impor pada tahun 2019 terkontraksi sebesar -7,69% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi ekspor sehingga mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit 3,2 miliar USD, daripada tahun sebelumnya sebesar defisit 8,7 miliar USD. Penurunan impor tersebut disebabkan oleh penurunan impor barang modal karena belum membaiknya investasi non-bangunan, penurunan impor bahan baku karena masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, serta berjalannya kebijakan dalam memenuhi permintaan domestik.

Di tengah ketidakpastian global pada tahun 2019, OJK berupaya untuk meningkatkan mitigasi risiko yang mungkin timbul dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi serta menjaga keamanan dan kualitas layanan agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh oleh OJK dengan menerbitkan 15 ketentuan tentang penguatan kelembagaan perbankan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir tahun 2019, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 9,93% (yoy) menjadi Rp. 538,32 triliun, 11,93% (yoy) menjadi Rp. 425,29 triliun, dan 10,89% (yoy) menjadi Rp. 365,13 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 9,93% (yoy) menjadi sebesar Rp. 538,32 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 9,89% (yoy) menjadi sebesar Rp. 524,56 triliun.

3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

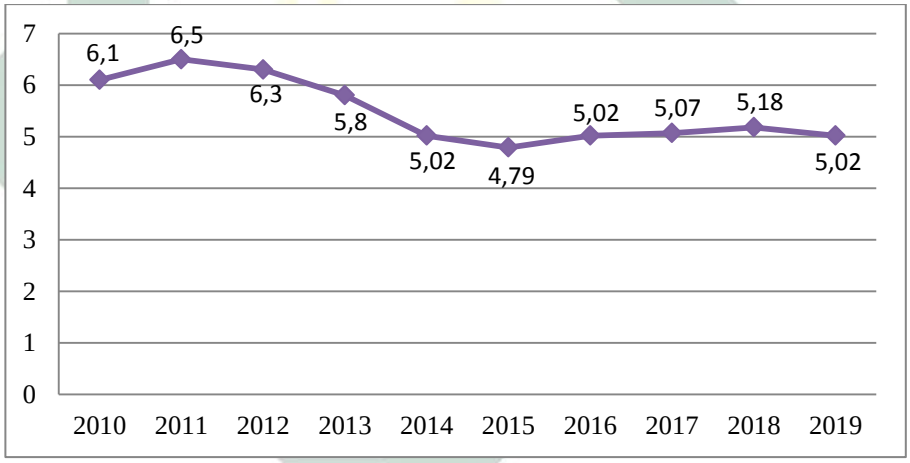

Grafik 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2010-2019[2]

Peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang dijelaskan di atas secara langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan industri perbankan, terutama perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki karakteristik *real sector driven*, sehingga peningkatan dan penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*, 2010-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah salah satunya dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber penghimpunan utama industri perbankan.

Berikut merupakan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Tabel 4.2

Perkembangan DPK BUS dan UUS Tahun 2010-2019[3]

Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	52.811	79.651	114.318	156.964	180.945	212.988	232.657	286.178	339.909	382.734
II	58.078	87.025	119.279	163.966	191.299	213.477	241.336	302.013	341.216	386.625
III	63.912	97.756	127.678	171.701	197.141	219.580	263.521	318.574	355.446	389.802
IV	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858	231.175	279.335	334.720	371.828	416.558

Perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2010 mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 77,64 triliun. Kemudian sampai dengan tahun 2019, DPK yang mampu dihimpun oleh perbankan syariah selalu mengalami perlambatan pertumbuhan kecuali di tahun 2016 dan 2019. Pada tahun 2011, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 51,35% (yoy) menjadi Rp. 117,51 triliun. Selanjutnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 28,03% (yoy) menjadi Rp. 150,45 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,43% (yoy) menjadi Rp. 187,19 triliun

[3] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 18,53% (yoy) menjadi Rp. 221,89 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,35% (yoy) menjadi Rp. 236,02 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, DPK perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 20,84% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun menjadi sebesar Rp. 285,16 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 19,83% (yoy) menjadi Rp. 341,71 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 11,20% (yoy) menjadi Rp. 379,96 triliun di tahun 2018. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, Perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan DPK yang sedikit mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 11,93% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun perbankan syariah menjadi sebesar Rp. 425,29 triliun.

Seiring dengan perbankan syariah yang cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan penghimpunan DPK kecuali di tahun 2011, 2016, dan 2019, komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan penghimpunan DPK kecuali pada tahun 2011, 2016, dan 2019. Pada tahun 2010, BUS dan UUS mampu menghimpun DPK sebesar Rp. 76,04 triliun. Selanjutnya mengalami pertumbuhan sebesar 51,79% (yoy) menjadi Rp. 115,42 triliun di tahun 2011, tumbuh melambat sebesar 27,81% (yoy) menjadi Rp. 147,51 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,42%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yoy) menjadi Rp. 183,53 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 18,71% (yoy) menjadi Rp. 217,86 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,11% (yoy) menjadi Rp. 231,17 triliun di tahun 2015.

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 20,83% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun menjadi sebesar Rp. 279,34 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 19,89% (yoy) menjadi Rp. 334,72 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 11,20% (yoy) menjadi Rp. 371,82 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 12,30% sehingga DPK yang mampu dihimpun perbankan syariah menjadi sebesar Rp. 416,56 triliun.

Pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menurun secara umum disebabkan oleh perbankan syariah yang mengalami kesulitan dalam mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat, mengingat perbankan syariah yang masih berskala usaha kecil-menengah sedangkan kalah saing dengan perbankan konvensional yang berskala besar. Persaingan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia yaitu bunga acuan BI atau BI *rate* karena tingkat suku bunga yang berlaku di bank konvensional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI *rate*. Sehingga apabila BI *rate* mengalami kenaikan, maka bank konvensional merespon pergerakan BI *rate* dengan menaikkan suku bunga simpanannya sehingga mengakibatkan nasabah lebih memilih menempatkan dana mereka di bank konvensional. Sedangkan bagi perbankan syariah yang tidak menganut konsep bunga, apabila terjadi kenaikan BI *rate* maka margin bagi hasil DPK perbankan syariah tidak bisa dinaikkan tanpa didasarkan pada kemampuan penyaluran pembiayaan sehingga berdampak pada menurunnya bahkan terhentinya pertumbuhan DPK. Hal ini salah satunya seperti yang terjadi di tahun 2013 dimana sejak Maret 2012, Bank Indonesia menetapkan BI *rate* sebesar 5,75%. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 6,00% sejak Juni 2013, meningkat menjadi sebesar 7,25% sejak September 2013, kemudian meningkat menjadi sebesar 7,50% sejak November 2013.

Sebaliknya, pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2016 terjadi karena BI *rate* mengalami penurunan. Sejak Maret 2016, Bank Indonesia menetapkan BI *rate* sebesar 6,75%. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 6,50% sejak Juni 2016, menurun menjadi sebesar 5,00% sejak September 2016, kemudian menurun menjadi sebesar 4,75% sejak Oktober 2016. Penurunan BI *rate* menyebabkan peningkatan pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro, ataupun deposito. Selain disebabkan oleh penurunan BI *rate*, peningkatan DPK juga menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah. Hal tersebut ditunjang oleh berjalannya sinergi antara bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK) untuk mengoptimalkan infrastruktur dan melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan IT, peningkatan jumlah kantor cabang, pemanfaatan Layanan Syariah (LS) atau *Office Channeling* dan Layanan Syariah Bank (LSB) atau *Delivery Channel*, serta berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan *stakeholder* perbankan syariah lainnya.

4. Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah memiliki beberapa instrumen penyaluran atau penempatan dana antara lain berupa penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan, penyertaan, serta tagihan lainnya. Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingan dengan penempatan lainnya. Selain Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan juga merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

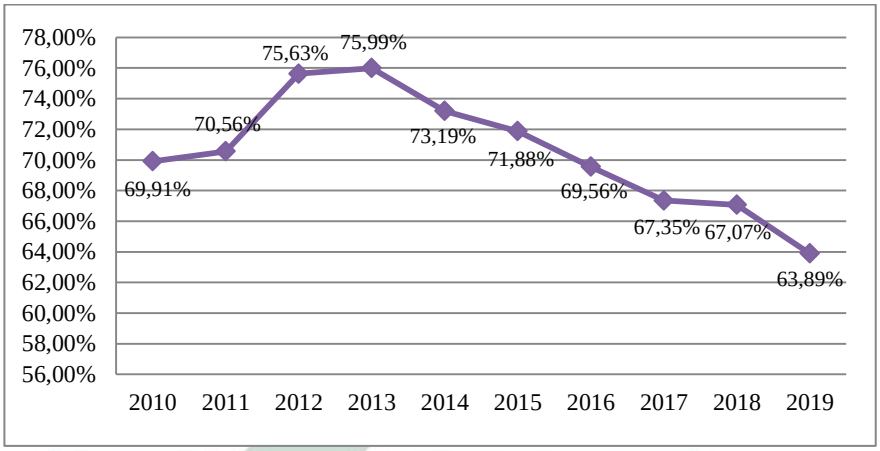

Grafik 4.2

Penempatan Dana BUS dan UUS dalam Bentuk Pembiayaan[4]

Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingan dengan penempatan lainnya. Terbukti bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS menempatkan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih dari 50% total Aset yang dimiliki. Berikut merupakan total pembiayaan yang mampu disalurkan atau biasa disebut dengan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Tabel 4.3

Perkembangan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019[5]

Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	50.206	74.253	104.239	161.081	184.964	200.712	213.482	250.536	286.622	326.993
II	55.801	82.616	117.592	171.227	193.136	206.056	222.174	265.317	295.021	333.080
III	60.970	92.839	130.357	177.320	196.563	207.829	235.005	271.576	310.519	343.864
IV	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996	248.007	285.786	320.193	355.182

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2010 mampu menyalurkan Pembiayaan sebesar Rp. 70,24 triliun. Kemudian sampai dengan tahun 2019, Pembiayaan yang mampu disalurkan oleh perbankan syariah selalu mengalami perlambatan pertumbuhan kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2011, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) mengalami pertumbuhan sebesar 49,97% (yoy) menjadi Rp. 105,34 triliun. Selanjutnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 43,41% (yoy) menjadi Rp. 151,06 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 188,55 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 8,37% (yoy) menjadi Rp. 204,31 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 7,06% (yoy) menjadi Rp. 218,72 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 16,41% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 254,67 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 15,24% (yoy) menjadi Rp. 293,46 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 12,21% (yoy) menjadi Rp. 329,28 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, Perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang sedikit mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 10,84%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 365,13 triliun.

Seiring dengan perbankan syariah yang mengalami perlambatan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) kecuali di tahun 2016, komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga selalu mengalami perlambatan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2010, BUS dan UUS mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 68,18 triliun. Selanjutnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102,66 triliun di tahun 2011, tumbuh melambat sebesar 43,69% (yoy) menjadi Rp. 147,51 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 184,12 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199,33 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,86% (yoy) menjadi Rp. 212,96 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) BUS dan UUS mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 16,44% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 248,01 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285,69 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 12,08% (yoy) menjadi Rp. 320,19 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 4,68% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 335,18 triliun.

Perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang dialami sejak pertengahan tahun 2013 antara lain dipengaruhi oleh ketatnya likuiditas sumber dana pembiayaan seiring kontraksi moneter, ekspektasi kenaikan risiko kredit, dan implementasi kebijakan prudensial seperti *Financing To Value* (FTV) dan *down payment* pembiayaan konsumsi. Pada tahun 2014, perlambatan pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang dan jasa sejalan perlambatan ekonomi yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi. Serta faktor ekspektasi peningkatan risiko kredit nasabah maupun calon nasabah dikaitkan dengan meningkatnya probabilitas *adverse selection* dalam kondisi kinerja sektor riil yang menurun dan di tengah pergeseran struktur pendanaan yang makin didominasi oleh deposito, di samping faktor konsolidasi internal bank yang diikuti dengan perubahan strategi bisnis dan pola pengendalian risiko. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan pembiayaan dikarenakan tekanan ekonomi yang masih berlangsung dan strategi bank yang lebih berhati-hati dalam penyaluran dana.

Pada tahun 2016, pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah mengalami peningkatan meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 16,41% tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, kontruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 7,87%.

Pada tahun 2017, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebagaimana Aset dan DPK yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh proses konsolidasi khususnya di Bank Umum Syariah (BUS) yang masih berlanjut dan berdampak kepada bank-bank syariah berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Sedangkan perlambatan pertumbuhan PYD tahun 2018 terjadi karena masih terfokusnya industri perbankan dalam melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan yang ditunjukkan oleh membaiknya risiko pembiayaan perbankan syariah yaitu menurunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perkembangan *Return On Assets* (ROA)

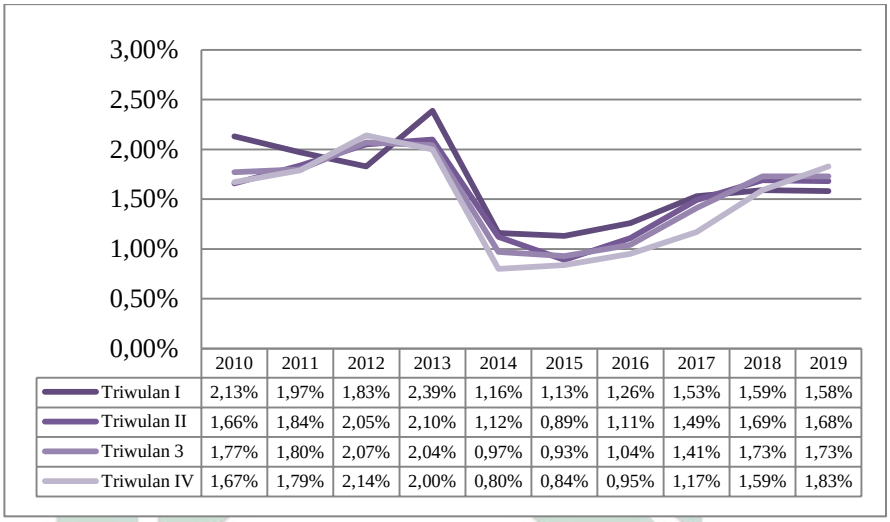

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Triwulan I	2,13%	1,97%	1,83%	2,39%	1,16%	1,13%	1,26%	1,53%	1,59%	1,58%
Triwulan II	1,66%	1,84%	2,05%	2,10%	1,12%	0,89%	1,11%	1,49%	1,69%	1,68%
Triwulan 3	1,77%	1,80%	2,07%	2,04%	0,97%	0,93%	1,04%	1,41%	1,73%	1,73%
Triwulan IV	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	0,80%	0,84%	0,95%	1,17%	1,59%	1,83%

Grafik 4.3

Perkembangan ROA BUS dan UUS Tahun 2010-2019[6]

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, tingkat pengembalian Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang ditunjukkan oleh rasio *Return On Assets* (ROA) rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2010, tingkat pengembalian Aset BUS dan UUS ditunjukkan oleh nilai ROA sebesar 1,67% dan meningkat menjadi 1,79% pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013, pengembalian Aset BUS dan UUS mencatatkan nilai ROA yang mengalami penurunan dari 2,14% pada tahun 2012 menjadi 2,00%. Apabila dibandingkan dengan perbankan nasional yang memiliki nilai ROA sebesar 3,1%, tingkat profitabilitas BUS dan UUS cenderung lebih rendah mengingat kemampuan menghasilkan pendapatan selain dari kegiatan penyaluran dana masih relatif terbatas.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2014, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan perbankan syariah berdampak pada penerimaan perbankan syariah, dimana BUS dan UUS mencatatkan nilai ROA yang mengalami penurunan drastis dari 2,00% di tahun 2013 menjadi 0,80% di tahun 2014. Penurunan ROA tersebut disebabkan oleh menurunnya ROA bank syariah besar. Apabila dibandingan dengan perbankan secara nasional yang mengalami penurunan ROA dari 3,1% menjadi sebesar 2,85% di tahun 2014, penurunan ROA BUS dan UUS cenderung tinggi yang berarti tingkat profitabilitasnya sangat turun. Penurunan tingkat profitabilitas tersebut berarti kinerja BUS dan UUS baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, diversifikasi sumber pendapatan, dan efisiensi operasional belum sebaik bank konvensional terutama bank-bank besar dalam mengantisipasi penurunan kinerja perekonomian.

Setelah mengalami penurunan ROA pada tahun 2014, tingkat pengembalian Aset BUS dan UUS mulai mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 1,15%. Sedangkan perbankan nasional justru mengalami penurunan ROA dari 2,85% menjadi 2,32% di tahun 2015 yang berarti bahwa kinerja perbankan syariah dalam hal ini BUS dan UUS lebih baik daripada kinerja bank konvensional. Pada tahun 2016 nilai ROA sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,20%, dibandingkan perbankan nasional yang mengalami penurunan menjadi 2,23%. Selanjutnya, nilai ROA BUS dan UUS tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan secara berurutan menjadi 1,55%, 1,76%, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1,89%, dimana peningkatan ROA ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan membaiknya efisiensi perbankan syariah (BOPO).

6. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF)

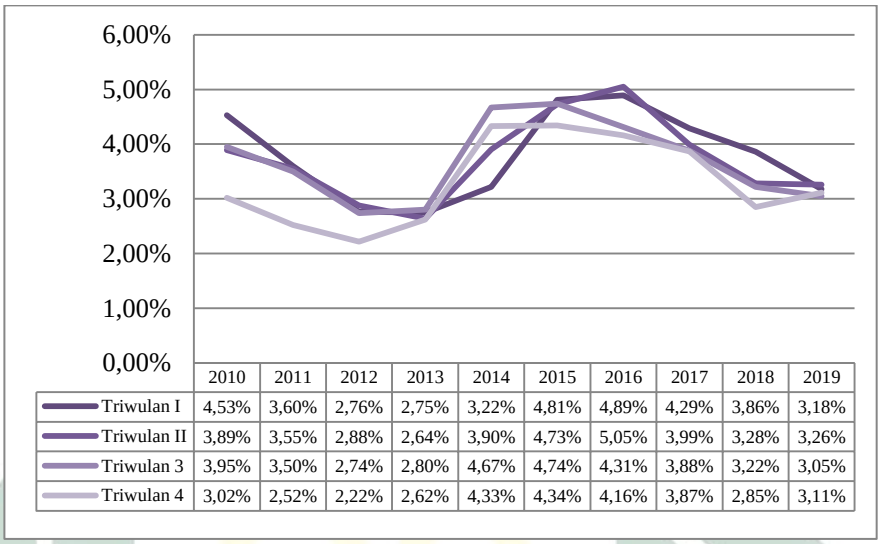

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Triwulan I	4,53%	3,60%	2,76%	2,75%	3,22%	4,81%	4,89%	4,29%	3,86%	3,18%
Triwulan II	3,89%	3,55%	2,88%	2,64%	3,90%	4,73%	5,05%	3,99%	3,28%	3,26%
Triwulan 3	3,95%	3,50%	2,74%	2,80%	4,67%	4,74%	4,31%	3,88%	3,22%	3,05%
Triwulan 4	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%	4,16%	3,87%	2,85%	3,11%

Grafik 4.4

Perkembangan NPF BUS dan UUS Tahun 2010-2019[7]

Dilihat dari segi pengelolaan risiko, BUS dan UUS pada tahun 2010 mencatatkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* sebesar 3,02%. Risiko kredit yang dihadapi oleh BUS dan UUS relatif menurun sampai dengan tahun 2012. Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan menurunnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* menjadi 2,52% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 2,22% pada tahun 2012.

Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014, risiko kredit BUS dan UUS mengalami peningkatan yang dicerminkan oleh meningkatnya NPF *Gross* sebesar 2,62% di tahun 2013 dan sebesar 4,33% di tahun 2014.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peningkatan risiko pembiayaan yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan oleh kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Meskipun pangsa pembiayaan *non performing* kurang dari 5% atau masih dalam batas yang terkendali, namun pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan dimitigasi lebih lanjut dalam kerangka manajemen risiko yang lebih komprehensif. Pada tahun 2014 *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* industri perbankan nasional juga mengalami peningkatan dari sebesar 1,82% menjadi 2,04%.

Tingkat NPF Gross BUS dan UUS pada tahun 2015 relatif masih dapat dipertahankan sebesar 3,93% dengan tetap terjaganya peningkatan tingkat pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan yang ditunjukkan dengan nilai FDR. Pada tahun 2016, Perbaikan NPF Gross BUS dan UUS sebesar 3,95% utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,42%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Pada tahun 2017 dan 2018, risiko kredit BUS dan UUS relatif menurun yang tercermin dari nilai NPF Gross sebesar 3,44% di tahun 2017 dan 2,70% di tahun 2018. Namun pada tahun 2019, nilai NPF *Gross* BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,06%, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,70%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank. Dengan kata lain, nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana (*funding*) yang cukup. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, perbankan syariah dikatakan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik apabila nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak kurang dari 78% dan tidak lebih dari 100%.

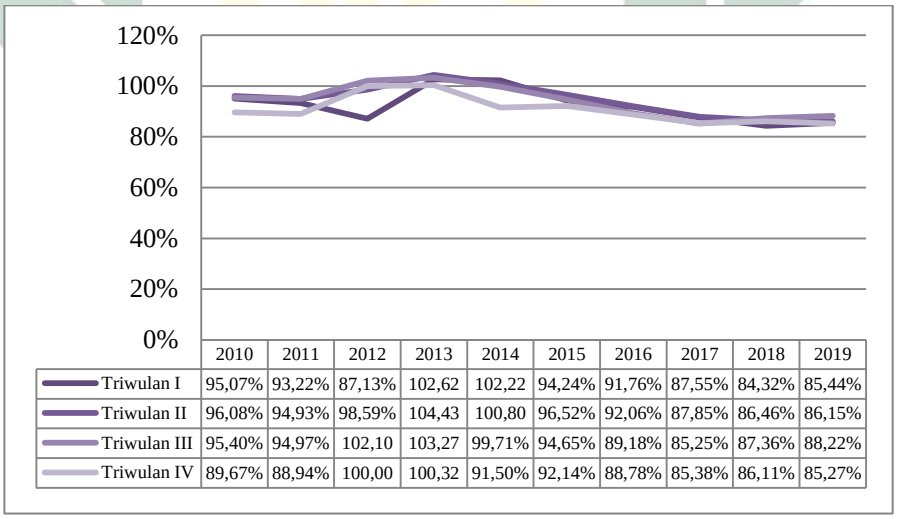

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Triwulan I	95,07%	93,22%	87,13%	102,62	102,22	94,24%	91,76%	87,55%	84,32%	85,44%
Triwulan II	96,08%	94,93%	98,59%	104,43	100,80	96,52%	92,06%	87,85%	86,46%	86,15%
Triwulan III	95,40%	94,97%	102,10	103,27	99,71%	94,65%	89,18%	85,25%	87,36%	88,22%
Triwulan IV	89,67%	88,94%	100,00	100,32	91,50%	92,14%	88,78%	85,38%	86,11%	85,27%

Grafik 4.5

Perkembangan FDR BUS dan UUS Tahun 2010-2019[8]

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi likuiditas, BUS dan UUS pada tahun 2010 mencatatkan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 89,67%. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 88,94%. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, nilai FDR BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 100,00% di tahun 2012 dan 100,32% di tahun 2013.

Pada tahun 2014, likuiditas BUS dan UUS mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan nilai FDR menjadi sebesar 91,50%. Penurunan FDR BUS dan UUS tersebut dikarenakan terjadi penurunan FDR BUS menjadi sebesar 86,66% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 95,9%. Selain itu, penurunan FDR BUS dan UUS juga disebabkan oleh FDR UUS yang mengalami penurunan menjadi sebesar 109,02%. Penurunan FDR perbankan syariah tersebut disebabkan oleh menurunnya rasio ROA pada bank syariah besar. Selanjutnya, pada tahun 2015 likuiditas BUS dan UUS mengalami peningkatan dengan meningkatnya nilai FDR menjadi sebesar 96,46% yang terjadi karena meningkatnya FDR BUS menjadi sebesar 88,03% sedangkan FDR UUS mengalami penurunan menjadi sebesar 104,88%.

Nilai FDR BUS dan UUS pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 96,46% menjadi sebesar 91,35%. Penurunan FDR BUS dan UUS tersebut dikarenakan terjadi penurunan FDR BUS menjadi sebesar 85,99% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 88,03% dan penurunan FDR UUS dari 104,88% menjadi sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

96,70%. Pada tahun 2017, likuiditas BUS dan UUS mengalami penurunan menjadi sebesar 89,52% yang terjadi karena penurunan drastis pada FDR BUS yang sebelumnya sebesar 85,99% menjadi 79,65% sedangkan FDR UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,39%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 96,70%.

Pada tahun 2018, nilai FDR BUS dan UUS mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 90,88% dengan adanya peningkatan FDR UUS dari sebesar 99,39% di tahun sebelumnya menjadi sebesar 103,22%, sementara FDR BUS mengalami penurunan menjadi sebesar 78,53%. Nilai FDR BUS dan UUS pada tahun 2019 tercatat sebesar 89,92%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh menurunnya FDR BUS menjadi sebesar 77,91% dan FDR UUS yang menurun menjadi sebesar 101,93%.

8. Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM)

Terdapat tujuan ganda dari diterapkannya GWM sebagai salah satu alat pengendalian moneter baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, penerapan GWM menyebabkan selalu tersedianya dana siaga dari setiap bank untuk membayar kewajibannya berupa penarikan dana pihak ketiga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan secara makro, penerapan GWM dapat digunakan untuk menyerap ekses likuiditas yang berlebihan dari bank dalam rangka mencapai kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. GWM harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya dampak sistemik pada sistem perbankan dan perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai GWM harus disesuaikan dari waktu ke waktu.

Perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia berpengaruh terhadap tugas Bank Indonesia di bidang moneter karena secara umum pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk memengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan reaksi Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Sedangkan secara khusus, perkembangan sektor keuangan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter karena mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya terjadi melalui sektor keuangan sesuai dengan fungsinya sebagai intermediasi keuangan.

Sebagai salah satu alat kebijakan moneter, pengaturan mengenai GWM yang berlaku juga disesuaikan dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu dan peran bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, dimana pelaksanaan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia (PBI) pertama mengenai GWM dirumuskan dalam PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, dimana dalam PBI tersebut terdapat ketentuan GWM dalam Rupiah sebesar 5% dan GWM dalam Valuta Asing sebesar 3%. Selanjutnya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2005 dilakukan perubahan yang tertuang dalam PBI No. 7/29/PBI/2005, dimana GWM dalam Rupiah tetap sebesar 5% namun terjadi perubahan dimana bank wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah yang tidak hanya ditetapkan berdasarkan besarnya DPK, tetapi juga berdasarkan besarnya LDR.

Perubahan ketentuan GWM oleh Bank Indonesia dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Perubahan Ketentuan GWM Perbankan Nasional 2010-2019[9]

No.	PBI Tentang GWM	Ketentuan GWM
1.	PBI No. 12/19/PBI/2010	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah. 3. GWM LDR dalam Rupiah a. Batas bawah LDR target sebesar 78% b. Batas atas LDR target sebesar 100%. GWM dalam Valuta Asing 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
2.	PBI No. 13/10/PBI/2011 Perubahan Pertama Atas PBI No. 12/19/PBI/2010	GWM dalam Rupiah – *Tetap* GWM dalam Valuta Asing 1. 1 Mar 2011 - 31 Mei 2011 GWM dalam Valuta Asing sebesar 5% dari DPK dalam Valuta Asing. 2. Sejak 1 Juni 2011

[9] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing.
3.	PBI No. 15/7/PBI/2013 Perubahan Kedua Atas PBI No. 12/19/PBI/2010 Diatur lebih lanjut oleh : SE No. 15/41/DKMP/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah – *Tetap* 2. GWM Sekunder dalam Rupiah a. Sampai 30 Sept 2013 Sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah. b. 1 Okt 2013 - 31 Okt 2013 Sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah. c. 1 Nov 2013 - 1 Des 2013 Sebesar 3,5% dari DPK dalam Rupiah. d. Sejak 2 Des 2013 Sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. 3. GWM LDR dalam Rupiah a. Batas bawah LDR target sebesar 78% b. Batas atas LDR target Sampai 1 Des 2013 = Sebesar 100% Sejak 2 Des 2013 = Sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
4.	PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah – *Tetap* 2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. 3. GWM LDR dalam Rupiah a. Batas bawah LDR target sebesar 78% b. Batas atas LDR target sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing.
5.	PBI No. 17/11/PBI/2015 Perubahan Pertama Atas PBI No. 15/15/PBI/2013 Diatur lebih lanjut oleh : SE No. 17/17/DKMP/2015	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah – *Tetap* 2. GWM Sekunder dalam Rupiah – *Tetap* 3. GWM LFR dalam Rupiah a. Batas bawah LFR target sebesar 78% b. Batas atas LFR target sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing – *Tetap*
6.	PBI No. 17/21/PBI/2015 Perubahan Kedua Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 7,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - *Tetap* 3. GWM LFR dalam Rupiah - *Tetap* GWM dalam Valuta Asing – *Tetap*
7.	PBI No. 18/3/PBI/2016 Perubahan Ketiga Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - *Tetap* 3. GWM LFR dalam Rupiah - *Tetap* GWM dalam Valuta Asing – *Tetap*
8.	PBI No. 18/14/PBI/2016 Perubahan Keempat Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - *Tetap* 3. GWM LFR dalam Rupiah a. Batas bawah LFR target sebesar 80% b. Batas atas LFR target sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing – *Tetap*
9.	PBI No. 19/6/PBI/2017 Perubahan Kelima Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Diperjelas oleh : PADG No. 19/4/PADG/2017	a. Secara harian sebesar 5% b. Secara rata-rata sebesar 1,5% 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - *Tetap* 3. GWM LFR dalam Rupiah - *Tetap* GWM dalam Valuta Asing – *Tetap*
10.	PBI No. 20/3/PBI/2018 Diperjelas oleh : PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM BUK 1. GWM dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: c. Secara harian sebesar 4,5% d. Secara rata-rata sebesar 2% 2. GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 6% b. Secara rata-rata sebesar 2% GWM BUS dan UUS 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 3% b. Secara rata-rata sebesar 2% 2. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
12.	PADG No. 20/30/PADG/2018 Perubahan Pertama Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM BUK 1. GWM dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 3,5% b. Secara rata-rata sebesar 3% GWM BUS dan UUS 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 2% b. Secara rata-rata sebesar 3%
13.	PADG No. 21/14/PADG/2019 Perubahan Kedua Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM BUK 1. GWM dalam Rupiah sebesar 6% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 3% b. Secara rata-rata sebesar 3% GWM BUS dan UUS 1. GWM dalam Rupiah sebesar 4,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 1,5% b. Secara rata-rata sebesar 3%

Sedangkan ketentuan GWM bagi komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sejak awal penetapan GWM bagi perbankan syariah sampai dengan akhir tahun 2019 tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), sebagai berikut:

Tabel 4.5

Perubahan Ketentuan GWM Perbankan Syariah[10]

No.	PBI dan PADG	Ketentuan GWM
1.	PBI No. 2/7/PBI/2000	**GWM Rupiah** 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah. **GWM Valuta Asing**

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	PBI dan PADG	Ketentuan GWM
		1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 3% dari DPK dalam Valuta Asing.
2.	PBI No. 6/21/PBI/2004	**GWM Rupiah** 1. *Tetap* 2. Bank dengan FDR kurang dari 80% dan a. Memiliki DPK Rp. 1-10 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 1%. b. Memiliki DPK Rp. 10-50 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 2%. c. Memiliki DPK lebih dari Rp. 50 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 3%. 3. Bank dengan FDR 80% atau lebih dan memiliki DPK Rp. 1 Triliun, tidak dikenakan kewajiban GWM tambahan. **GWM Valuta Asing** 1. *Tetap*
3.	PBI No. 8/23/PBI/2006 Perubahan Atas PBI No. 6/21/PBI/2004	**GWM Rupiah dan Valuta Asing** – *Tetap.* Terjadi perubahan pada Bab IV tentang Tata Cara Perhitungan Rasio Pembiayaan dalam Rupiah Terhadap DPK dalam Rupiah bagian Pasal 11.
4.	PBI No. 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004	**GWM Rupiah** – *Tetap* **GWM Valuta Asing** 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
5.	PBI No. 15/16/PBI/2013	**GWM Rupiah dan Valuta Asing** – *Tetap.* Terjadi penambahan pasal pada Bab II tentang Pemenuhan GWM yaitu Pasal 4 yang berisi kelonggaran atas kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	PBI dan PADG	Ketentuan GWM
		pemenuhan GWM dalam Rupiah.
6.	PBI No. 20/3/PBI/2018 Diperjelas oleh : PADG No. 20/10/PADG/2018	**GWM Rupiah** 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 3% b. Secara rata-rata sebesar 2% **GWM Valuta Asing** 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
7.	PADG No. 20/30/PADG/2018 Perubahan Pertama Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	**GWM Rupiah** 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 2% b. Secara rata-rata sebesar 3%
8.	PADG No. 21/14/PADG/2019 Perubahan Kedua Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	**GWM Rupiah** 1. GWM dalam Rupiah sebesar 4,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 1,5% b. Secara rata-rata sebesar 3%

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan ketentuan mengenai GWM, maka jumlah cadangan minimum yang ditempatkan oleh BUS dan UUS pada Bank Indonesia juga mengalami perubahan, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.6

Perkembangan GWM BUS dan UUS Tahun 2010-2019[11]

Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	8.635	13.689	23.024	28.092	29.284	37.214	40.094	56.468	63.863	57.064
II	8.343	14.203	18.055	24.212	30.012	31.855	38.945	47.100	51.110	68.693
III	9.852	16.148	18.479	26.007	32.364	37.384	49.391	57.764	56.021	52.473
IV	16.393	27.127	26.713	31.946	42.715	41.051	50.580	64.143	62.744	52.473

Berdasarkan PBI No. 12/19/PBI/2010 yang mulai berlaku pada 1 November 2010, pada akhir tahun 2010 tercatat bawa BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 16.393 miliar. Pada tahun 2011, BI melakukan perubahan pertama atas PBI No. 12/19/PBI/2010 dalam PBI No. 13/10/PBI/2011 yang mulai berlaku pada 9 Februari 2011. Berdasarkan perubahan ketentuan tersebut, BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 27.127 miliar pada tahun 2011 dan sebesar Rp. 26.713 miliar pada tahun 2012. Selanjutnya, BI melakukan perubahan kedua yang tertuang dalam PBI No. 15/7/PBI/2013 yang mulai berlaku pada 26 September 2013 sehingga BUS dan UUS pada akhir tahun 2013 tercatat telah menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 31.946 miliar.

Pada akhir tahun 2013, BI mengganti ketentuan mengenai GWM dalam PBI No. 15/15/PBI/2013 yang berlaku mulai pada 31 Desember 2013 sehingga BUS dan UUS pada akhir tahun 2014 tercatat telah menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 42.715 miliar. PBI No.

[11] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15/15/PBI/2013 tersebut 5 (lima) kali mengalami perubahan yaitu perubahan pertama tertuang dalam PBI No. 17/11/PBI/2015 yang berlaku mulai 26 Juni 2015, perubahan kedua dalam PBI No. 17/21/PBI/2015 yang berlaku mulai 1 Desember 2015, perubahan ketiga dalam PBI No. 18/3/PBI/2016 yang berlaku mulai 16 Maret 2016, perubahan keempat dalam PBI No. 18/14/PBI/2016 yang berlaku mulai 24 Agustus 2016, dan terakhir yaitu perubahan kelima dalam PBI No. 19/6/PBI/2017 yang berlaku mulai 1 Juli 2017. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan ketentuan mengenai GWM dalam selang waktu 2015 dan 2017 tersebut menyebabkan perubahan jumlah cadangan minimum yang disimpan oleh BUS dan UUS pada BI. BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 41.051 miliar pada tahun 2015, Rp. 50.580 miliar pada tahun 2016, dan Rp. 64.143 miliar pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 62.744 miliar dan sebesar Rp. 52.473 miliar pada tahun 2019 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang diatur dalam PBI No. 20/3/PBI/2018 yang mulai berlaku pada 16 Juli 2018.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, dimana dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data laporan triwulan statistik perbankan syariah periode 2010 sampai dengan 2019. Teknik analisis data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linier berganda dengan program komputer yaitu *software Statistic Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21 untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Hasil dari analisis data tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas

      Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan dasar pengambilan keputusan yang melihat nilai probabilitas signifikansi data residual.

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas[12]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2845,35288700
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,480
Asymp. Sig. (2-tailed)		,975

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

[12] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), didapatkan bahwa nilai probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,975 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas[13]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-158752,423	14408,681		-11,018	,000		
	DPK	,873	,016	1,056	53,505	,000	,079	12,713
	ROA	-7074,023	1935,086	-,034	-3,656	,001	,346	2,891
	NPF	-1348,916	997,192	-,012	-1,353	,185	,402	2,490
	FDR	1941,400	113,422	,134	17,117	,000	,502	1,992
	GWM	,072	,110	,014	,658	,515	,065	15,301

a. Dependent Variable: PYD

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), didapatkan bahwa:

[13] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pada variabel DPK, didapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,079 (*Tolerance* < 0,1) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 12,713 (VIF > 10).
2) Pada variabel ROA, didapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,346 (*Tolerance* > 0,1) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 2,891 (VIF < 10).
3) Pada variabel NPF, didapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,402 (*Tolerance* > 0,1) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 2,490 (VIF < 10).
4) Pada variabel FDR, didapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,502 (*Tolerance* > 0,1) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,992 (VIF < 10).
5) Pada variabel GWM, didapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,065 (*Tolerance* < 0,1) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 15,301 (VIF > 10).

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat variabel yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Sehingga model penelitian masih terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW).

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi[14]

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999[a]	,999	,999	3.047,397	1,553

a. Predictors: (Constant), GWM, NPF, FDR, ROA, DPK

b. Dependent Variable: PYD

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW), didapatkan bahwa Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,553. Pada tabel DW dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (N) sebanyak 40 sampel, dan jumlah variabel independen (k) 5, diperoleh batas bawah (d_L) 1,2305 dan batas atas (d_U) 1,7859. Dilihat dari ketentuan pengujian *Durbin-Watson*, nilai d berada di antara d_L dan d_U ($d_L<d<d_U$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi lemah dan perbaikan akan lebih baik.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola pada Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID).

[14] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

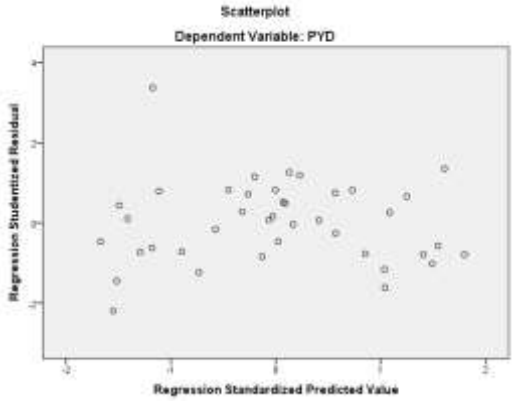

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas[15]

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat pola pada Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID), didapatkan bahwa pada Grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Persamaan regresi dalam analisis regresi linier berganda dapat dikatakan layak digunakan atau diaplikasikan apabila telah memenuhi asumsi-asumsi yaitu variabel penggangu atau residual terdistribusi normal (uji normalitas), korelasi antar prediktor yang rendah atau tidak ada multikolinieritas (uji multikolinieritas), variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri (uji autokorelasi), dan homoskedastisitas (uji heteroskedastisitas).

[15] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uji asumsi klasik diatas, persamaan regresi belum layak digunakan karena terjadi masalah multikolinieritas dan autokorelasi. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinieritas dan autokorelasi adalah dengan melakukan transformasi data ke dalam bentuk *first difference*. *First Difference* adalah perbandingan antara nilai variabel pada periode yang sedang berjalan (periode t) dengan nilai variabel pada periode sebelumnya (periode t-1).

2. Uji Asumsi Klasik *First Difference*

a. Uji Normalitas *First Difference*

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas *First Difference*[16]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2210,25863196
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,053
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,485
Asymp. Sig. (2-tailed)		,973

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), didapatkan bahwa nilai probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,973 atau lebih

[16] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas *First Difference*

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinieritas *First Difference*[17]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2502,069	735,316		3,403	,002		
	dDPK	,599	,073	,931	8,240	,000	,553	1,808
	dROA	-584,528	1581,243	-,032	-,370	,714	,963	1,038
	dNPF	-2353,506	1061,134	-,218	-2,218	,034	,732	1,366
	dFDR	1038,270	158,263	,727	6,560	,000	,574	1,741
	dGWM	-,090	,078	-,126	-1,146	,260	,585	1,708

a. Dependent Variable: dPYD

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), didapatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Sehingga model penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi *First Difference*

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

[17] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.12

Hasil Uji Autokorelasi *First Difference*[18]

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,876[a]	,767	,732	2371,799	1,986

a. Predictors: (Constant), dGWM, dROA, dNPF, dFDR, dDPK

b. Dependent Variable: dPYD

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW), didapatkan bahwa Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,986. Pada tabel DW dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (N) sebanyak 39 sampel, dan jumlah variabel independen (k) 5, diperoleh batas bawah (d_L) 1,2176 dan batas atas (d_U) 1,7886. Dilihat dari ketentuan pengujian *Durbin-Watson*, nilai d berada di antara d_U dan 4-d_U (d_U<d<4-d_U), sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas *First Difference*

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

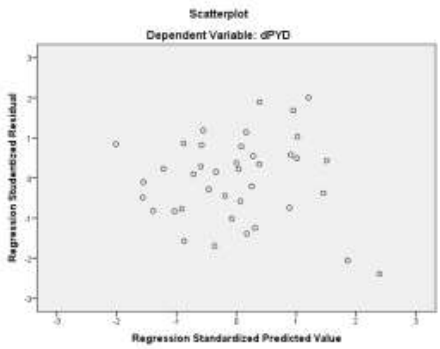

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas *First Difference*[20]

[18] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat pola pada Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID), didapatkan bahwa pada Grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda[21]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-158752,423	14408,681		-11,018	,000
	DPK	,873	,016	1,056	53,505	,000
	ROA	-7074,023	1935,086	-,034	-3,656	,001
	NPF	-1348,916	997,192	-,012	-1,353	,185
	FDR	1941,400	113,422	,134	17,117	,000
	GWM	,072	,110	,014	,658	,515

a. Dependent Variable: PYD

[20] Olah data SPSS, 21, 2020.
[21] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda di atas, diperoleh model persamaan regresi berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$PYD = -158752,423 + 0,873DPK – 7074,023ROA – 1348,916NPF + 1941,400FDR + 0,072GWM + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linier di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (b_0) sebesar -158752,423 yang menunjukkan bahwa apabila variabel DPK (X_1), ROA (X_2), NPF (X_3), FDR (X_4), dan GWM (X_5) konstan, maka besarnya PYD (Y) yaitu sebesar -158752,423.

b. Koefisien regresi (b_1) untuk variabel DPK (X_1) sebesar 0,873 dan mempunyai koefisien regresi positif yang menunjukkan adanya persamaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila DPK (X_1) naik sebesar 1 rupiah, maka dapat menaikkan PYD (Y) sebesar 0,873 dan sebaliknya apabila DPK (X_1) turun sebesar 1 rupiah, maka akan menurunkan PYD (Y) sebesar 0,873, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

c. Koefisien regresi (b_2) untuk variabel ROA (X_2) sebesar -7074,023 dan mempunyai koefisien regresi negatif yang menunjukkan adanya perbedaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila ROA (X_2) naik sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 7074,023 dan sebaliknya apabila ROA (X_2) turun sebesar 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen, maka akan menaikkan PYD (Y) sebesar 7074,023, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

d. Koefisien regresi (b_3) untuk variabel NPF (X_3) sebesar -1348,916 dan mempunyai koefisien regresi negatif yang menunjukkan adanya perbedaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila NPF (X_3) naik sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 1348,916 dan sebaliknya apabila NPF (X_3) turun sebesar 1 persen, maka akan menaikkan PYD (Y) sebesar 1348,916, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

e. Koefisien regresi (b_4) untuk variabel FDR (X_4) sebesar 1941,400 dan mempunyai koefisien regresi positif yang menunjukkan adanya persamaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila FDR (X_4) naik sebesar 1 persen, maka dapat menaikkan PYD (Y) sebesar 1941,400 dan sebaliknya apabila FDR (X_4) turun sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 1941,400, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

f. Koefisien regresi (b_5) untuk variabel GWM (X_5) sebesar 0,072 dan mempunyai koefisien regresi positif yang menunjukkan adanya persamaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila GWM (X_5) naik sebesar 1 rupiah, maka dapat menaikkan PYD (Y) sebesar 0,072 dan sebaliknya apabila GWM (X_5) turun sebesar 1 rupiah, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 0,072, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen.

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi[22]

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999[a]	,999	,999	3.047,397

a. Predictors: (Constant), GWM, NPF, FDR, ROA, DPK

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999 yang berarti bahwa DPK, ROA, NPF, FDR, dan GWM mampu menjelaskan perubahan pada PYD sebesar 99,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi simultan yaitu apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara pengambilan keputusan uji

[22] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikansi simultan (Uji F) pada penelitian ini yaitu jika nilai F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai F hitung < F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan uji signifikansi simultan (Uji F), yaitu:

1) Menentukan hipotesis

   H_0 : Seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

   H_a : Seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

2) Menentukan taraf signifikansi, yaitu α = 5% atau 0,05.

3) Menentukan nilai F tabel

   Dalam penelitian ini, diketahui bahwa nilai k (jumlah variabel independen) = 5 dan nilai n (jumlah sampel) = 40. Untuk mengetahui nilai F tabel, dibutuhkan nilai df_1 dan df_2 yang dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

   F tabel $= f (df_1 ; df_2)$

   $= f (k ; n-k-1)$

   $= f (5 ; 40-5-1)$

   $= f (5 ; 34)$

   Apabila dilihat pada tabel distribusi F, didapatkan nilai F tabel sebesar 2,49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menentukan nilai F hitung

Tabel 4.15

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)[23]

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302643155969,765	5	60528631193,953	6517,828	,000[b]
	Residual	315745289,010	34	9286626,147		
	Total	302958901258,775	39			

a. Dependent Variable: PYD

b. Predictors: (Constant), GWM, NPF, FDR, ROA, DPK

Berdasarkan tabel hasil uji signifikansi simultan (uji F) di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 6517,828 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu 6517,828 > 2,49 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga diperoleh asumsi bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi PYD atau dengan kata lain variabel independen yaitu DPK (X_1), ROA (X_2), NPF (X_3), FDR (X_4), dan GWM (X_5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PYD (Y).

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi parsial yaitu apakah tiap-tiap variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara pengambilan keputusan uji signifikansi parsial (Uji t) pada penelitian ini yaitu jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

[23] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan uji signifikansi parsial (Uji t), yaitu:

1) Menentukan hipotesis

H_0 : Variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : Variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Menentukan taraf signifikansi, yaitu α = 5% atau 0,05.

3) Menentukan nilai t tabel

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa nilai k (jumlah variabel independen) = 5 dan nilai n (jumah sampel) = 40. Untuk mengetahui nilai t tabel, dibutuhkan nilai α/2 dan db yang dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

t tabel = t (α/2 ; db)

= t (α/2 ; n-k-1)

= t (0,05/2 ; 40-5-1)

= t (0,025 ; 34)

Apabila dilihat pada tabel distribusi t, didapatkan nilai t tabel sebesar 1,960.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menentukan nilai t hitung

Tabel 4.16

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)[24]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-158752,423	14408,681		-11,018	,000
	DPK	,873	,016	1,056	53,505	,000
	ROA	-7074,023	1935,086	-,034	-3,656	,001
	NPF	-1348,916	997,192	-,012	-1,353	,185
	FDR	1941,400	113,422	,134	17,117	,000
	GWM	,072	,110	,014	,658	,515

a. Dependent Variable: PYD

Berdasarkan tabel hasil uji signifikansi parsial (Uji t) di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Pengujian pengaruh variabel DPK (X_1) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar 53,505, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 53,505 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel DPK (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD (Y).

b) Pengujian pengaruh variabel ROA (X_2) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar -3,656, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 3,656 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,001 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PYD.

[24] Olah data SPSS, 21, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pengujian pengaruh variabel NPF (X_3) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar -1,353, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu 1,353 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu 0,185 > 0,05. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.

d) Pengujian pengaruh variabel FDR (X_4) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar 17,117, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 17,117 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD.

e) Pengujian pengaruh variabel GWM (X_5) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,658, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu 0,658 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu 0,515 > 0,05. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel GWM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dengan menggunakan program komputer *software Statistic Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh DPK (X_1) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung > t tabel dengan nilai sebesar 53,505 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α dengan nilai sebesar 0,000 < 0,05, dimana t hitung bernilai positif yang berarti DPK (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan, dimana semakin besar DPK yang mampu dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan Pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil DPK yang mampu dihimpun, maka semakin kecil pula kemampuan penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dikarenakan DPK merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam hal penyaluran dana, khususnya melalui instrumen pembiayaan. Sehingga apabila perbankan syariah mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka perbankan syariah mampu menyalurkan dana khususnya melalui instrumen pembiayaan dalam jumlah besar pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qolbi (2013), Hasi (2014), Adzimatinur (2014), Nurrochman (2016), Umiyati (2016), Pujiana (2017), dan Bakti (2017) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap besaran Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

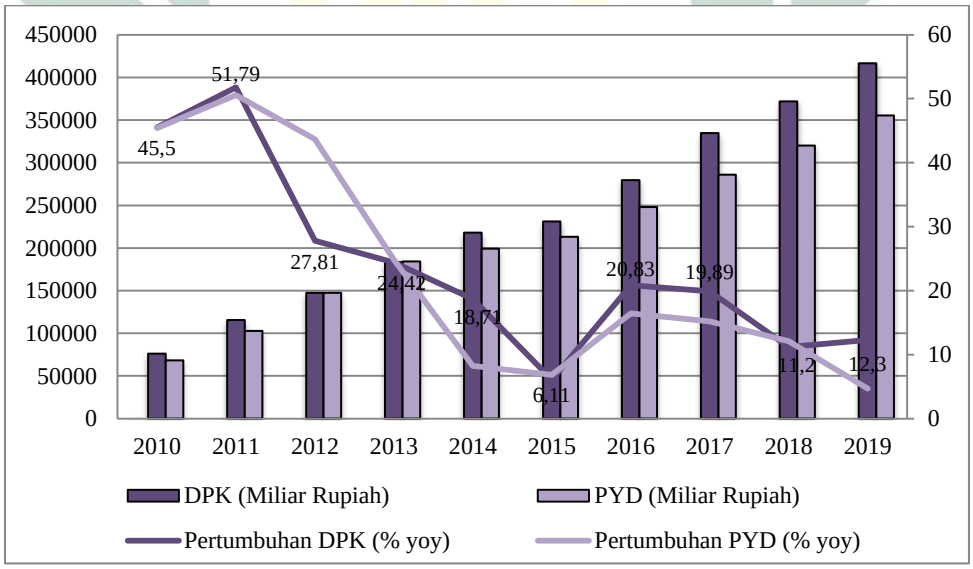

Grafik 5.1

Perkembangan DPK dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019[1]

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Grafik 5.1 diketahui bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nominal Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh BUS dan UUS selalu mengalami peningkatan seiring dengan nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Perbankan syariah memiliki karakteristik *real sector driven*, sehingga peningkatan dan penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Apabila terjadi penurunan kondisi ekonomi nasional, khususnya inflasi yang meningkat, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi perbankan di Indonesia yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan BI atau BI *rate*. Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya seperti perbankan konvensional, kenaikan BI *rate* berpengaruh pada jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh perbankan syariah. Sehingga secara umum, perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh ketidakmampuan perbankan syariah dalam mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

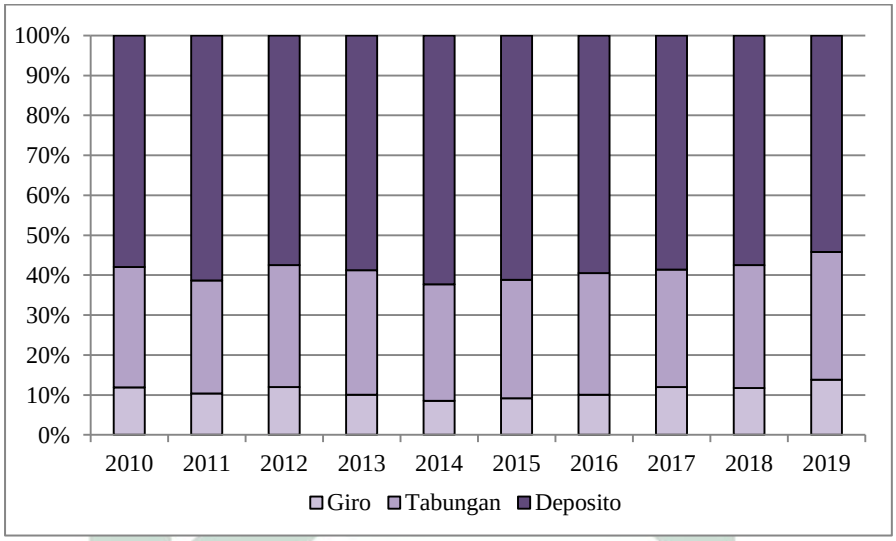

Grafik 5.2

Komposisi Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS Tahun 2010-2019[1]

Berdasarkan Grafik 5.2 diketahui bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah didominasi oleh sumber dana dalam bentuk deposito dengan rata-rata mencapai 58,86% dari total DPK. Berdasarkan jenisnya, deposito tergolong dana mahal karena bank memberikan margin simpanan lebih besar daripada giro dan tabungan yang tergolong dana murah. Margin simpanan deposito yang lebih besar disebabkan karena penarikannya berjangka sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati antara nasabah penyimpan dengan bank syariah. Kondisi tersebut menjadikan bank syariah dapat mengatur kebutuhan likuiditasnya, sehingga kegiatan operasional bank dapat berlangsung dengan optimal.

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2010-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat, Bank Indonesia meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan BI atau BI *rate*. Kondisi tersebut menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Inflasi yang meningkat akan meningkatkan suku bunga deposito. Perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat merespon kenaikan BI *rate* dengan menaikkan suku bunga depositonya sehingga nasabah lebih memilih menempatkan dana mereka di bank konvensional karena bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan lebih menarik daripada *return* di perbankan syariah. Lebih tingginya *return* di perbankan konvensional menyebabkan terjadinya peningkatan pengalihan dana yang besar (*displacement*) dari perbankan syariah ke perbankan konvensional terutama oleh nasabah korporasi karena mereka sensitif terhadap imbal hasil yang ditawarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlambatan pertumbuhan DPK perbankan syariah disebabkan karena terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang diikuti oleh kenaikan BI *rate*, khususnya yang terjadi pada tahun 2013 dan 2018, dimana telah terjadi kenaikan BI *rate* setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan penghimpunan DPK perbankan syariah mengalami perlambatan. Nilai BI *rate* di awal tahun 2013 adalah sebesar 5,75% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak Maret 2012. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 6,00% sejak Juni 2013, meningkat menjadi sebesar 7,25% sejak September 2013, kemudian meningkat menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 7,50% sejak November 2013. Sedangkan nilai BI *rate* di awal tahun 2018 adalah sebesar 4,25% yang ditetapkan sejak September 2017, yang selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 5,25% sejak Juni 2018, meningkat menjadi sebesar 5,75% sejak September 2017, dan kemudian meningkat menjadi sebesar 6,00% sejak November 2018.

Sebaliknya, peningkatan pertumbuhan DPK seperti yang dialami pada tahun 2016 disebabkan karena terjadi penurunan BI *rate*. Sejak Maret 2016, Bank Indonesia menetapkan BI rate sebesar 6,75%. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 6,50% sejak Juni 2016, menurun menjadi sebesar 5,00% sejak September 2016, kemudian menurun menjadi sebesar 4,75% sejak Oktober 2016. Penurunan BI rate menyebabkan peningkatan pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro, ataupun deposito. Selain disebabkan oleh penurunan BI rate, peningkatan DPK juga menunjukkan semakin membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah. Hal tersebut ditunjang oleh berjalannya sinergi antara bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK) untuk mengoptimalkan infrastruktur dan melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan IT, peningkatan jumlah kantor cabang, pemanfaatan Layanan Syariah (LS) atau Office Channeling dan Layanan Syariah Bank (LSB) atau Delivery Channel, serta berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan stakeholder perbankan syariah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dihadapkan pada masalah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat, perbankan syariah juga dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Bagi dunia usaha, inflasi dapat menguntungkan produsen barang dan jasa apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada kenaikan biaya produksi, sehingga produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, inflasi juga dapat merugikan produsen barang dan jasa apabila inflasi menyebabkan meningkatnya biaya produksi, sehingga produsen akan menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, produsen juga akan mengalami kerugian usaha apabila tidak sanggup untuk mengikuti laju inflasi.

Kondisi sektor rill yang lemah akan menyebabkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Apabila pembiayaan yang digunakan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka kerugian usaha debitur juga akan ditanggung oleh perbankan syariah. Apabila pembiayaan yang digunakan berdasarkan akad jual beli, maka tingginya inflasi menyebabkan produk pembiayaan perbankan syariah secara umum menjadi relatif lebih mahal. Tingginya NPF menyebabkan perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dengan cara mengurangi penyaluran pembiayaan ke sektor rill, serta lebih memilih untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya di pasar uang dan pasar modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam hal penyaluran dana, khususnya melalui instrumen pembiayaan. Sehingga apabila perbankan syariah mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar pula. Terbukti bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS selalu mengalami peningkatan, diikuti oleh nominal Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang juga selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.

Pada tahun 2010, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) BUS dan UUS tumbuh 45,42% (yoy) dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 68.181 Miliar dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102.655 miliar di tahun 2011. BUS dan UUS mengalami perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, PYD tumbuh melambat sebesar 43,69% (yoy) menjadi Rp. 147.505 miliar, dimana perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK sebagai dampak krisis ekonomi keuangan global yang belum membaik sehingga perbankan syariah mengembangkan kebijakan penyaluran pembiayaan pada sektor yang paling menguntungkan. Selanjutnya, pada tahun 2013 PYD BUS dan UUS tumbuh sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 184.122 miliar, dimana perlambatan pertumbuhannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi oleh ketatnya persaingan untuk menarik likuiditas, ekspektasi kenaikan NPF, dan implementasi kebijakan prudensial seperti *Financing To Value* (FTV) dan *down payment* pembiayaan konsumsi. Tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199.330 miliar di tahun 2014 yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dengan meningkatnya inflasi yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa dan diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat, ekspektasi kenaikan NPF dikaitkan dengan meningkatnya probabilitas *adverse selection* dalam kondisi kinerja sektor riil yang menurun dan di tengah pergeseran struktur DPK yang makin didominasi oleh deposito, di samping faktor konsolidasi internal bank yang diikuti dengan perubahan strategi bisnis dan pola pengendalian risiko. PYD BUS dan UUS kembali mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 6,86% (yoy) menjadi Rp. 212.996 miliar di tahun 2015 dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang masih berlangsung dan strategi bank yang berhati-hati dalam penyaluran dana karena rasio NPF perbankan syariah sempat di posisi 4,81%.

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan selama 4 (empat) tahun, pada tahun 2016 PYD BUS dan UUS mengalami peningkatan pertumbuhan meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana PYD tumbuh sebesar 16,44% (yoy) menjadi Rp. 248.007 miliar. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 16,41% tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, kontruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan perbankan syariah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 7,87%.

Pada tahun 2017, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebagaimana Aset dan DPK yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana PYD tumbuh melambat sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285.786 miliar. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh proses konsolidasi khususnya di Bank Umum Syariah (BUS) yang masih berlanjut dan berdampak kepada bank-bank syariah berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Selanjutnya, PYD BUS dan UUS tumbuh melambat sebesar 12,08% (yoy) menjadi Rp. 320.193 miliar di tahun 2018 yang terjadi karena masih terfokusnya industri perbankan dalam melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan, ditunjukkan oleh membaiknya risiko pembiayaan perbankan syariah yaitu menurunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 4,68% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 335.182 miliar, dimana penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya DPK bank yang disalurkan dalam bentuk instrumen penyaluran dana lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, sampel penelitian berhasil membuktikan teori bahwa semakin besar DPK yang mampu dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga intermediasi dengan menyalurkan Pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil DPK yang mampu dihimpun, maka semakin kecil pula kemampuan penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah.

B. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh ROA (X_2) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung > t tabel dengan nilai sebesar 3,656 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α dengan nilai sebesar 0,001 < 0,05, dimana t hitung bernilai negatif yang berarti ROA (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan, dimana semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Rasio ROA yang tinggi berarti bank telah mengelola Aset secara optimal dalam hal penyaluran Pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rasio ROA, maka semakin kecil pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola Aset yang dimiliki, salah satunya melalui penyaluran Pembiayaan. Melihat dalam periode penelitian, Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingan dengan penempatan lainnya, bahkan lebih dari 50% total Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Lestasi (2012) yang menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

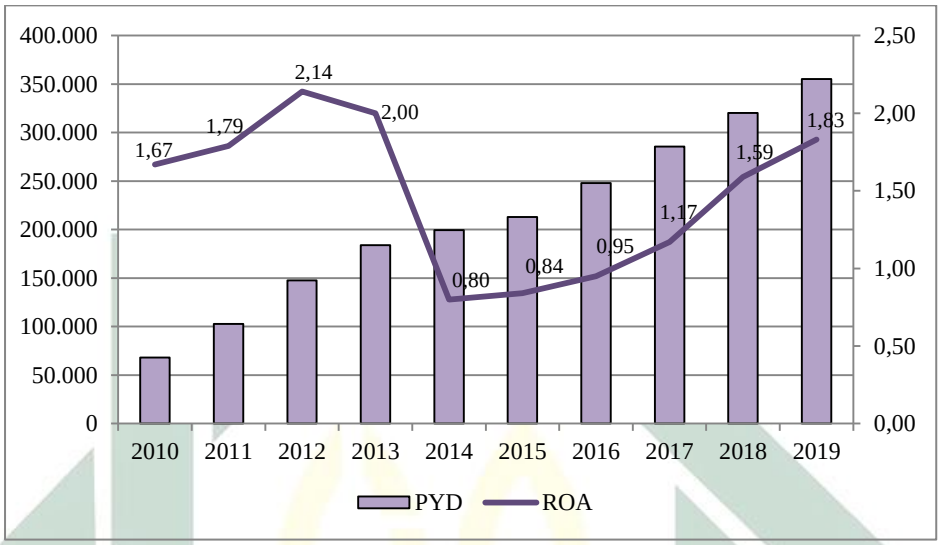

Grafik 5.3

Perkembangan ROA dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019[2]

Berdasarkan Grasik 5.3 diketahui bahwa selama periode 2010-2019, tren ROA selalu meningkat kecuali pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan tren Pembiayaan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada triwulan I 2013 ROA menunjukkan nilai sebesar 2,39% dengan total pembiayaan sebesar Rp. 161.081 Miliar, pada triwulan II 2013 ROA menurun menjadi 2,10% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 171.227 Miliar, pada triwulan III 2013 ROA menurun menjadi 2,04% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 177.320 Miliar, dan pada akhir tahun 2013 tercatat ROA menurun menjadi 2,00% dengan total pembiayaan yang meningkat menjadi Rp. 184.122 Miliar. Hal demikian juga terjadi pada tahun 2014

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana pada triwulan I 2014 ROA menunjukkan nilai sebesar 1,16% dengan total pembiayaan sebesar Rp. 184.964 Miliar, pada triwulan II 2014 ROA menurun menjadi 1,12% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 193.136 Miliar, pada triwulan III 2014 ROA menurun menjadi 0,97% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 196.563 Miliar, dan pada akhir tahun 2014 tercatat ROA menurun menjadi 0,80% dengan total pembiayaan yang meningkat menjadi Rp. 199.330 Miliar. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan.

Penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Peningkatan inflasi menyebabkan kondisi usaha debitur menurun. Kondisi sektor rill yang lemah akan menyebabkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Pada kondisi NPF yang tinggi, perbankan syariah harus lebih banyak menyediakan cadangan modal untuk menutupi jumlah pembiayaan yang bermasalah sehingga rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah rendah. Selanjutnya, CAR perbankan yang rendah menyebabkan rasio profitabilitas atau ROA perbankan syariah juga rendah. Sehingga, pada kondisi NPF yang tinggi perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dengan semakin mereview pembiayaan yang sudah dan akan diberikan untuk mengontrol dan memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga perbankan syariah mengurangi penyaluran pembiayaan ke sektor rill. Pertumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang menurun berarti perbankan syariah belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sehingga rasio profitabilitas atau ROA perbankan syariah rendah.

Secara umum, penurunan rasio profitabilitas (ROA) perbankan syariah pada tahun 2013 dan 2014 secara umum disebabkan karena risiko pembiayaan (NPF) perbankan syariah yang mengalami peningkatan dan pembiayaan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Rasio ROA pada tahun 2013 mengalami penurunan dari sebesar 2,14% di tahun 2012 menjadi sebesar 2,00%. Hal ini disebabkan karena risiko pembiayaan (NPF) perbankan syariah mengalami peningkatan dari sebesar 2,22% di tahun 2012 menjadi sebesar 2,62%, serta pertumbuhan pembiayaan yang menurun dari sebesar 43,69% (yoy) di tahun 2012 menjadi hanya sebesar 24,82% (yoy) di tahun 2013. Sedangkan rasio ROA pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis dari sebesar 2,00% menjadi sebesar 0,80%, dimana hal ini disebabkan karena rasio NPF perbankan syariah mengalami peningkatan yang juga drastis, dari sebesar 2,62% menjadi sebesar 4,33% di tahun 2014. Serta pertumbuhan pembiayaan yang menurun dari sebesar 24,82% (yoy) di tahun 2013 menjadi hanya sebesar 8,24% (yoy).

Besarnya penurunan ROA yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 menyebabkan sampel penelitian tidak berhasil membuktikan teori bahwa semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ROA maka semakin rendah kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

C. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh NPF (X_3) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung < t tabel dengan nilai sebesar 1,353 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α dengan nilai sebesar 0,185 > 0,05, berarti NPF (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan. Saat terjadi pembiayan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi rasio NPF, maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

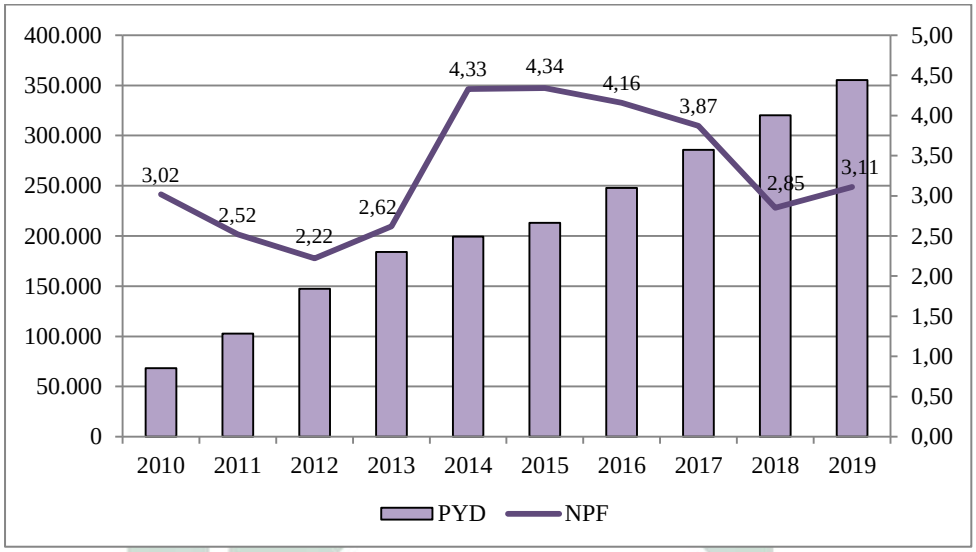

Grafik 5.4

Perkembangan NPF dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019[3]

Berdasarkan Grafik 5.4 diketahui bahwa selama periode 2010-2019, tren NPF menurun pada tahun 2011, 2012, 2016, 2017, dan 2018 dan meningkat pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2019, sedangkan tren Pembiayaan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Perbankan syariah mencatatkan NPF sebesar 2,22% pada, meningkat menjadi sebesar 2,62% di akhir tahun 2013, meningkat menjadi sebesar 4,33% di akhir tahun 2014, dan meningkat menjadi sebesar 4,34% di akhir tahun 2015. Pada akhir tahun 2019, NPF perbankan syariah tercatat meningkat menjadi sebesar 3,11% dari tahun sebelumnya sebesar 2,85%. Seringnya terjadi peningkatan NPF yang diiringi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penurunan kinerja perbankan syariah dalam hal ini yaitu meningkatnya risiko pembiayaan terjadi seiring dengan penurunan kondisi ekonomi nasional. Selama tahun 2013 sampai dengan 2015, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat menurun dari sebesar 6,3% (yoy) di tahun 2012 menjadi sebesar 5,8% (yoy). Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 5,02% (yoy) di tahun 2014 dan menurun kembali menjadi sebesar 4,79% (yoy) di tahun 2015. Pada tahun 2019, Indonesia kembali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,18% (yoy) di tahun 2018 menjadi sebesar 5,02% di tahun 2019. Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, risiko pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan. NPF perbankan syariah pada tahun 2013 sampai dengan 2015 berturut-turut tercatat sebesar 2,62% di tahun 2013, meningkat menjadi sebesar 4,33% di tahun 2014, dan meningkat menjadi sebesar 4,34% di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2019, NPF perbankan syariah tercatat meningkat dari sebesar 2,85% di tahun 2018 menjadi sebesar 3,11%.

Penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Peningkatan inflasi menyebabkan kondisi usaha debitur menurun. Kondisi sektor rill yang lemah akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Saat terjadi pembiayan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu sampel penelitian tidak berhasil membuktikan teori bahwa semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka semakin tinggi kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan sumber dana yang digunakan oleh perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga apabila perbankan syariah mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar pula. Sedangkan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, sumber dana yang digunakan oleh perbankan syariah untuk menutupinya yaitu berasal dari modal bank.

D. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh FDR (X_4) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung > t tabel dengan nilai sebesar 17,117 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α dengan nilai sebesar 0,000 < 0,05, dimana t hitung bernilai positif yang berarti FDR (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan, dimana semakin tinggi rasio FDR maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin tinggi pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah rasio FDR maka semakin rendah pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank syariah mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012), Hasi (2014), Adzimatinur (2014), Nurrochman (2016), dan Umiyati (2016) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap besaran Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

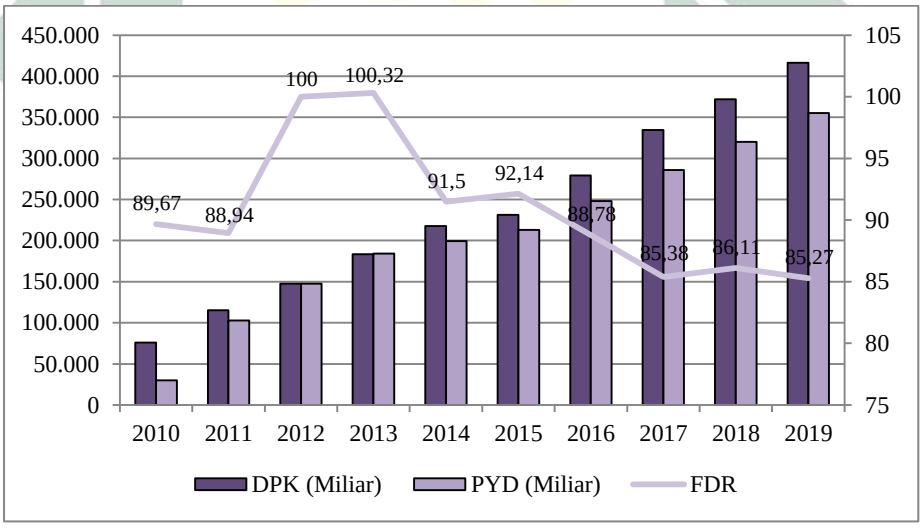

Grafik 5.5

Perkembangan DPK, PYD, dan FDR BUS dan UUS Tahun 2010-2019[4]

Berdasarkan Grafik 5.5 diketahui bahwa selama periode 2010-2019, tren FDR tidak selalu meningkat seiring dengan tren Pembiayaan yang semakin meningkat setiap tahunnya, melainkan tren FDR perbankan syariah

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan pada tahun 2011, 2014, 2016, 2017, dan 2019. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan FDR tidak konsisten dengan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, perbankan syariah mencatatkan FDR sebesar 88,94%, menurun dibandingkan dengan FDR tahun 2010 sebesar 89,67%, sedangkan PYD tumbuh sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102.655 miliar. FDR perbankan syariah tahun 2014 tercatat sebesar 91,50%, menurun dibandingkan dengan FDR tahun 2013 sebesar 100,32%, sedangkan PYD tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199.330 miliar. Pada tahun 2016, FDR perbankan syariah menurun dari sebesar 92,14% menjadi 88,78% dan menurun kembali menjadi sebesar 85,38% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016, PYD tumbuh 16,44% (yoy) menjadi Rp. 248.007 miliar dan kemudian tumbuh melambat sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285.786 miliar di tahun 2017. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, perbankan syariah mencatatkan FDR sebesar 85,27%, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 86,11%, sedangkan PYD tumbuh melambat dari sebesar 12,08% (yoy) menjadi hanya 4,68% hingga mencapai Rp. 335.182 miliar.

Secara umum, penurunan FDR perbankan syariah disebabkan karena pertumbuhan DPK lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD, dimana hal ini terjadi karena NPF perbankan syariah mengalami peningkatan. Dalam kondisi ekonomi nasional yang menurun dan diikuti oleh kondisi sektor rill yang menurun, NPF perbankan syariah mengalami peningkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peningkatan NPF menyebabkan perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dan lebih memilih untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya di pasar uang dan pasar modal, dibandingkan menyalurkan pembiayaan ke sektor rill.

Pada tahun 2011, perbankan syariah mencatatkan penurunan FDR menjadi sebesar 88,94% yang disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 51,79% (yoy) lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 50,57% (yoy), dimana hal ini seiring dengan NPF perbankan syariah yang mengalami peningkatan mencapai 3,60% pada triwulan I, namun kemudian menurun menjadi sebesar 2,52% pada akhir tahun. FDR perbankan syariah pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 91,50%, disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 18,71% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 8,24% (yoy), seiring dengan NPF yang mencapai 4,33%. Tahun 2016 FDR perbankan syariah menurun menjadi sebesar 88,78% yang disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 20,83% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 16,44% (yoy), seiring dengan NPF yang meningkat menjadi sebesar 4,16%. FDR perbankan syariah menurun menjadi sebesar 85,38% pada tahun 2017 karena pertumbuhan DPK yang sebesar 19,89% (yoy) lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD sebesar 15,20%. Pada akhir tahun penelitian, perbankan syariah mencatatkan FDR yang mengalami penurunan menjadi sebesar 85,27%, disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 12,30% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh hanya sebesar 4,68% (yoy), seiring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan NPF yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,11% pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, sampel penelitian berhasil membuktikan teori bahwa semakin besar rasio FDR, berarti semakin besar pula kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan Pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil rasio FDR berarti semakin kecil pula kemampuan penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah.

E. Pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh GWM (X_5) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung < t tabel dengan nilai sebesar 0,658 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α dengan nilai sebesar 0,515 > 0,05, berarti GWM (X_5) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Pembiayaan. Perubahan ketentuan GWM akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh bank, dimana semakin rendah ketentuan GWM yang diwajibkan kepada bank, maka semakin tinggi jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin tinggi pula Pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin tinggi ketentuan GWM maka semakin rendah jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin rendah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

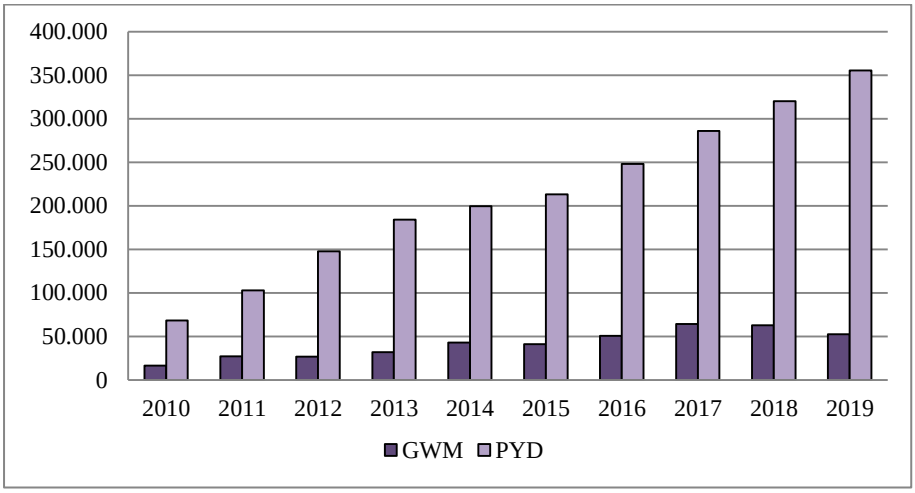

Grafik 5.6

Perkembangan GWM dan PYD BUS dan UUS Tahun 2010-2019[5]

Berdasarkan Grafik 5.5 diketahui bahwa selama periode 2010-2019, tren jumlah GWM yang ditempatkan pada BI oleh perbankan syariah menurun pada tahun 2012, 2015, 2018, dan 2019 dan meningkat pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2017, sedangkan tren Pembiayaan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Pembiayaan, dimana semakin tinggi ketentuan GWM maka semakin rendah jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin rendah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa GWM tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Hal ini disebabkan karena GWM merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang atau kebijakan yang tidak secara langsung dirasakan dampaknya.

Dalam jangka panjang, perubahan ketentuan GWM akan berpengaruh terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana semakin tinggi ketentuan

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GWM yang diwajibkan kepada bank, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap kondisi bank, karena bank mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabahnya sehingga akan terjadi peningkatan jumlah DPK. Selanjutnya, semakin tinggi jumlah DPK atau dana yang dipegang oleh bank, maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Sedangkan penelitian ini hanya dilakukan pada periode penelitian yang pendek yaitu tahun 2010-2019, sehingga hasil dari penelitian ini yaitu sampel penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif GWM terhadap besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2010-2019" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 53,505, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 53,505 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, yang artinya variabel DPK (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD (Y).
2. Variabel *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar -3,656, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 3,656 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,001 < 0,05. Sehingga H_{02}

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak dan H_{a2} diterima, yang artinya variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PYD.

3. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,353, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu 1,353 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu 0,185 > 0,05. Sehingga H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang artinya variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.
4. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 17,117, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 17,117 > 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD.
5. Variabel kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,658, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu 0,658 < 1,960 dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu 0,515 > 0,05. Sehingga H_{05} diterima dan H_{a5} ditolak, yang artinya variabel GWM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan untuk tidak puas dengan hasil penelitian ini, mengingat terdapat perbedaan hasil penelitian dengan peneliti lain. Sehingga peneliti diharapkan untuk terus belajar dan menambah wawasan, khususnya tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi besaran atau jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 5 (lima) variabel independen. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama sebaiknya menggunakan variabel independen yang lebih banyak ataupun menggunakan variabel-variabel lain diluar model penelitian ini, baik dari faktor internal maupun eksternal agar memperoleh hasil yang bervariasi sehingga mampu menggambarkan faktor apa saja yang dapat memengaruhi besaran pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah.

Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih valid dan lebih akurat, mengingat terdapat beberapa faktor yang bersifat jangka panjang atau tidak secara langsung dirasakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampaknya yang dapat memengaruhi besaran pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah.

3. Bagi Perbankan Syariah

   a. Perbankan syariah diharapkan untuk dapat membuat inovasi-inovasi produk agar dapat menarik minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank, dimana akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan yang selanjutnya meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh perbankan syariah.

   b. Perbankan syariah diharapkan untuk lebih menyasar dana murah yaitu tabungan dan giro dalam komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK), mengingat Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah didominasi oleh deposito. Sedangkan dalam kondisi penurunan ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat diikuti oleh kenaikan BI *rate*, perbankan syariah kalah saing dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah terancam mengalami penurunan pertumbuhan karena adanya peningkatan pengalihan dana yang besar atau *displacement* dari perbankan syariah ke perbankan konvensional.

   c. Perbankan syariah diharapkan untuk terus meningatkan kinerja manajemen pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah dengan cara lebih teliti dalam melakukan seleksi calon debitur, mengontrol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha debitur, dan lainnya sehingga NPF perbankan syariah tetap rendah.

d. Perbankan syariah diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan Aset terutama melalui penyaluran pembiayaan. Dimana perbaikan kinerja perbankan akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya dan secara tidak langsung akan menarik minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank.

e. Selain fokus pada pengembangan produk dan manajemennya, perbankan syariah juga diharapkan untuk fokus pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah yang akan mendukung perkembangan industri perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Teknik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.

Basuki¸ Agus Tri dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi.* Jakarta: Prenadamedia, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhammad. *Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi, 2006.

Rianto, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Rivai, Veithzal, dkk. *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional Syaria System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Supriyadi, Edy. *SPSS+Amos Statistical Data Analysis*. Jakarta: In Media, 2014.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Adzimatinur, Fauziyah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2014.

Bakti, Nurimansyah Setivia. "Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Hasi, Fahrul Rosi dan Yaya Sonjaya. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Future*, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khatimah, H. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008”. *Jurnal Optimal*, Vol. 3, No. 1, 2009.

Lestari, Fitri Suci. “Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2012.

Nurrochman, Isnu dan Mahfudz. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah: Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015”. *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Pujiana, Asri. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. 2017.

Qolby, Muhammad Luthfi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No. 4, 2013.

Rijal, Akmalur. “Pengetahuan Konsumen Terhadap IB Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya” 1, no. 1 (2018): 117–39.

Solihatun. “Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2014.

Teniwut, Wellem A. “Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia”. Skripsi—Institut Pertanian Bogor, 2006.

Umiyati dan Leni Tantri Ana. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. No. 1, April, 2017.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Akmalur Rijal, and Ida Wijayanti. “Financing Model to Develop Local Commodity Business of East Java in Maqashid Syariah Perspective.” *Test Engineering and Management* 83, no. 3590 (2020): 3590–95.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, Nasif Sidquee Pauzi, and Rafidah binti Mohd Azli. “The Synergy Model for Strengthening the Productivity of Indonesian Halal Industry” 4, no. 28 (2020): 186–99. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, and Akmalur Rijal. “Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankkan 2018 | 1090,” 2018, 1090–1104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*. Jakarta: 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2014*. Jakarta: September 2015.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015*. Jakarta: Agustus 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2016*. Jakarta: Juni 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2017*. Jakarta: Juni 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2018*. Jakarta: 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2014: Memperkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan*. Jakarta: 26 Juni 2015.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2015: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Jasa Keuangan Yang Kontributif, Stabil, dan Inklusif*. Jakarta: 27 Juni 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2016: Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah*. Jakarta: 10 Juli 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2017: Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan*. Jakarta: 28 Agustus 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2018: Memacu Pertumbuhan*. Jakarta: 26 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id